



2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS

**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Wonosobo**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	9
2.2. Sumber daya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.....	17
2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	33
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.....	47
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis.....	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
3.1 Visi dan Misi RPJMD	59
3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD	60
3.3 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.....	61
3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Tahunan	66
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
4.1 Program dan Kegiatan	71
4.2 Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	76
4.3 Subkegiatan Prioritas	140
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	157
BAB V. PENUTUP.....	165

DAFTAR TABEL

1 Tabel 2.2.1 Latar Belakang Pendidikan.....	18
2 Tabel 2.2.1.2. SDM Berdasarkan Golongan	20
3 Tabel 2.2.1.3. Tabel data pegawai berdasarkan Jabatan	21
4 Tabel 2.2.1.4. Tabel data pegawai berdasarkan Umur.....	23
5 Tabel 2.2.2.1 Sarana Prasarana.....	26
6 Tabel 2.2.1.1 Aset Tanah	30
7 Tabel 2.3.1 Target dan Capaian IKU tahun 2020 - 2024	34
8 Tabel 2.3.2. Target dan Capaian IKK tahun 2020 - 2024	39
9 Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi	46
10 Tabel 2.5.1.1 Data Indeks Ketahanan Pangan Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2024.....	48
11 Tabel 2.5.4.1 Data Luas Panen Beras Kabupaten Wonosobo.....	52
12 Tabel 2.5.4.2 Data Hasil Panen Komoditas Hortikultura	53
13 Tabel 2.5.2 Isu Strategis	55
14 Tabel 3.1. Visi dan Misi RPJMD	59
15 Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran.....	62
16 Tabel 3.4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.....	67
17 Tabel 3.4.2 Penahapan Rencana Strategis	68
18 Tabel 4.2.1 Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	77
19 Tabel 4.2.2 Target Dan Pagu Indikatif Tahun.....	116
20 Tabel 4.3 Subkegiatan Prioritas	141
21 Tabel 4.4.1 Indikator Kinerja Utama	158
22 Tabel 4.4.2 Indikator Kinerja Kunci	161

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi kondisi pangan, Pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang pangan, Pertanian dan perikanan serta di bidang ekonomi secara umum.

Pembangunan pertanian dalam arti luas yang merupakan komponen dari agrobisnis sebagai fokus pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah dengan cara membangun ekosistem agrobisnis yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal untuk mendukung kemandirian pangan. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya

pertanian Wonosobo yang Sejahtera, Adil dan Makmur.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029 “Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” serta visi RPJMD Tahun 2025-2029 “Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan periode 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2025–2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023–2043 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Wonosobo Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo;
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan perikanan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 adalah untuk memberikan arah pembangunan selama tahun 2025-2029 dan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan di bidang pangan, Pertanian dan perikanan, guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 bertujuan:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo ke dalam tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi pembangunan bidang pangan, Pertanian dan perikanan yang terukur dan operasional selama periode 2025–2029.
2. Mengidentifikasi isu strategis dan merumuskan arah kebijakan serta strategi pembangunan sektor pangan, Pertanian dan perikanan, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas Pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pelaku agribisnis.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan bidang pangan, Pertanian dan perikanan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efisien dan efektif.

4. Menjadi sarana integrasi dan sinergi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sehingga tercipta tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel dan berorientasi hasil.
5. Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan dinas dalam menentukan skala prioritas dan pengembangan sumber daya. Selain itu, juga berfungsi sebagai acuan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Bupati Nomor: 000.7.2.2/0556/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah RENSTRA PD Tahun 2025-2029 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang penyusunan rencana strategis, dasar hukum yang menjadi acuan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen serta gambaran umum mengenai struktur penulisan dokumen Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029.

Bab II: Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Bab ini menyajikan kondisi nyata pelayanan publik di bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo, termasuk capaian kinerja, tantangan operasional, permasalahan struktural serta isu-isu strategis yang relevan dengan dinamika pembangunan daerah, perubahan iklim, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, nelayan serta pelaku agribisnis.

Bab III: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memaparkan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025–2029 yang selaras dengan visi, misi dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo serta arah kebijakan dan strategi sebagai pedoman pelaksanaan program dinas.

Bab IV: Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menyajikan rincian program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan selama lima tahun ke depan, dilengkapi dengan indikator kinerja utama, target capaian kinerja tahunan, pagu indikatif serta keterkaitan setiap subkegiatan dengan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten

Wonosobo.

Bab V: Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan dokumen Renstra, harapan terhadap implementasi rencana strategis serta rekomendasi kebijakan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, penganggaran dan pevaluasi kinerja dinas secara berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang Pertanian serta sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, sekaligus melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Tugas tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya strategis, antara lain meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui ketersediaan, keterjangkauan dan distribusi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi masyarakat; mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor Pertanian dan perikanan agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat; memperkuat kelembagaan serta pemberdayaan pelaku usaha Pertanian dan perikanan agar semakin mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan; serta mengintegrasikan kebijakan dan program pembangunan daerah di bidang pangan, Pertanian dan perikanan sesuai dengan arah pembangunan daerah maupun nasional. Dengan demikian, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo berperan sebagai motor penggerak dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan produksi dan penguatan daya saing daerah yang pada akhirnya mendukung terwujudnya masyarakat Wonosobo yang sejahtera, berdaya saing dan berkelanjutan.

2. Fungsi

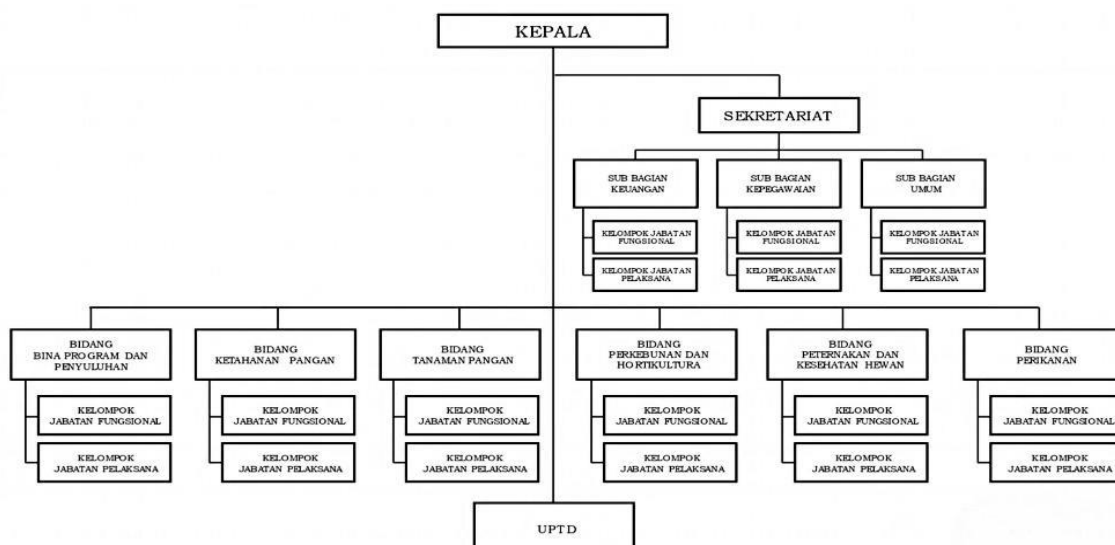
Dalam melaksanakan fungsinya, menurut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan, Pertanian dan

- perikanan serta kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan pengendalian kebijakan di bidang pangan, Pertanian dan perikanan;
 3. Pelaksanaan kegiatan urusan pangan, termasuk penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan stabilisasi pasokan serta harga pangan;
 4. Pelaksanaan kegiatan urusan Pertanian meliputi sarana dan prasarana Pertanian perbenihan, perlindungan tanaman, peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian bencana Pertanian serta perizinan usaha pertanian;
 5. Pelaksanaan kegiatan urusan perikanan, mencakup perikanan budidaya, penangkapan ikan dan pengawasannya di perairan umum serta penguatan daya saing hasil perikanan;
 6. Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian dan perikanan;
 7. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
 8. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dan dukungan administrasi internal;

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Struktur bagan organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Sebagaimana gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas menyiapkan koordinasi, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Sekretariat terdiri atas tiga Sub Bagian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sub Bagian Keuangan

Bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan aset Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, yang mencakup perumusan kebijakan teknis keuangan, pengoordinasian pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah.

b. Sub Bagian Kepegawaian

Bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan dukungan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan sarana prasarana perkantoran serta pengelolaan layanan persuratan dan dokumentasi kegiatan dinas.

c. Sub Bagian Umum

Bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi dan manajemen kepegawaian, organisasi dan tata laksana, termasuk pengelolaan data kepegawaian, pelaksanaan urusan mutasi, kenaikan pangkat, penilaian kinerja, disiplin serta penyusunan ketatalaksanaan dinas.

b. Bidang Bina Program dan Penyuluhan

Bidang Bina Program dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina program.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Program dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan;
3. Pengkajian dan pengembangan kebijakan, strategi dan program di sektor pertanian dan perikanan;
4. Penyusunan perencanaan, dokumen pelaksanaan anggaran,

capaian kinerja dan laporan-laporan lainnya;

5. Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
6. Penyiapan penyusunan program penyuluhan pertanian;
7. Penyiapan bahan kemitraan antar Perangkat Daerah, dengan dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan pembangunan pertanian dan perikanan;
8. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan;
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan.

c. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
2. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyiapan pelaksanaan program ketahanan pangan, meliputi: penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan Daerah, penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
5. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
6. Penyiapan kegiatan penanganan kerawanan pangan, meliputi: pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
7. Penyiapan pelaksanaan program keamanan pangan, melalui:

pelaksanaan pengawasan kerawanan pangan;

8. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.

d. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
2. Penyiapan bahan koordinasi di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
4. Pengumpulan informasi dan permasalahan, pengkajian dan penyiapan bahan rekomendasi serta upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan pertanian tanaman pangan;
5. Penyiapan pelaksanaan program di bidang sarana pertanian tanaman pangan berupa pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan;
6. Penyiapan pelaksanaan program di bidang prasarana pertanian tanaman pangan berupa pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan;
7. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tanaman pangan;
8. Penyiapan bahan perizinan usaha pertanian;
9. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;

10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan.

e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perkebunan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
2. Penyiapan bahan koordinasi kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
4. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
5. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian perkebunan dan hortikultura;
6. Penyiapan bahan pemberian izin usaha pertanian perkebunan dan hortikultura;
7. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perkebunan dan hortikultura;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan dan hortikultura.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. Penyiapan bahan koordinasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. Penyiapan bahan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta peningkatan produksi ternak;

5. Penyiapan bahan sarana peternakan meliputi pengelolaan sumber daya genetik ternak, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, pengawasan obat hewan ditingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta penyediaan bibit ternak;
6. penyiapan bahan pengelolaan prasarana Pertanian meliputi: pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum;
7. Penyiapan bahan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, meliputi: penjaminan kesehatan hewan, pengendalian penyakit hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan ke luar Daerah, pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
8. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
9. Penyiapan bahan rekomendasi perizinan usaha produksi ternak, bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan, rumah pemotongan hewan, praktek jasa medis/paramedis hewan dan inseminasi buatan;
10. Penyiapan bahan rekomendasi penerbitan perizinan usaha pengecer obat hewan;
11. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
12. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

g. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumber daya perikanan serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
2. Penyiapan bahan koordinasi di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumber daya perikanan serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumber daya perikanan serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
4. Penyiapan bahan analisis kebutuhan dan pemanfaatan sarana

- prasarana budidaya dan penangkapan;
5. Penyiapan bahan pemantauan kualitas perairan dan lingkungan lahan budidaya;
 6. Pelaksanaan fasilitasi program tematik bidang perikanan;
 7. Pembinaan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan dalam batas kewenangan Kabupaten;
 8. Pengawasan peredaran obat ikan/pakan ikan dan Inventarisasi kebutuhan obat-obat ikan, pupuk dan pakan;
 9. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumber daya perikanan serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
 10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumber daya perikanan serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang bersifat pelaksanaan dari tugas dinas di lapangan. Keberadaan UPTD dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan publik di bidang pangan, Pertanian dan perikanan. Struktur dan kedudukan UPTD ini berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

UPTD yang berada di bawah naungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo terdiri atas:

1. **UPT Balai Benih Padi Sari Aji** – berfungsi sebagai pusat produksi, sertifikasi dan distribusi benih padi unggul bagi petani di Kabupaten Wonosobo;
2. **UPT Rumah Potong Hewan (RPH)** – berfungsi menyediakan pelayanan pemotongan hewan yang higienis, memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner serta menjamin keamanan produk hewan;
3. **UPT Balai Benih Ikan (BBI)** – berfungsi menghasilkan, mengembangkan dan mendistribusikan benih ikan berkualitas untuk mendukung usaha budidaya perikanan;
4. **Balai Penyuluh Pertanian (BPP)** – berfungsi sebagai pusat kegiatan penyuluhan Pertanian pendampingan petani serta penguatan kapasitas kelompok tani dan kelembagaan petani di tingkat kecamatan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok pegawai yang memiliki keahlian tertentu dan melaksanakan tugas-tugas berdasarkan keahlian tersebut secara mandiri. Kelompok jabatan fungsional tidak menduduki jabatan struktural, tetapi memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas teknis, seperti:

- Penyuluh Pertanian
- Penyuluh Perikanan
- Pengawas Mutu Pangan
- Petugas Medik Veteriner dan sebagainya

2.2. Sumber daya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Secara umum, keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari dukungan sumberdaya yang ada. Sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusia Pertanian sumberdaya asset/ modal dan sumber daya yang berupa unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Kondisi SDM saat ini menunjukkan variasi latar belakang pendidikan dan status kepegawaian yang tersebar di berbagai bidang serta unit pelaksana teknis (UPT). Komposisi SDM berdasarkan jenjang pendidikan menjadi cerminan kapasitas teknis dan manajerial yang dimiliki oleh dinas dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

Secara umum, sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1), diikuti oleh lulusan diploma (D3) dan pascasarjana (S2). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur di lingkungan dinas sudah relatif baik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Pertanian perikanan serta ketahanan pangan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan menengah (SMA dan SMP), terutama di kelompok tenaga pelaksana lapangan dan non-ASN, yang memerlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.

Analisis ini menjadi dasar bagi perencanaan pengembangan SDM, baik melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, maupun penempatan pegawai sesuai kompetensi. Secara rinci, komposisi SDM berdasarkan jenjang pendidikan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1 Latar Belakang Pendidikan

BIDANG	STATUS	PENDIDIKAN												JML
		SD		SMP		SMA		D3		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SEKRETARIAT														
	ASN					1	1		2	3	2	1		10
	NON ASN			1		6				1	1			9
JUMLAH														19
BINA PROGRAM DAN PENYULUHAN														
	ASN								1	3	2			6
	NON ASN									1				1
JUMLAH														7
PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA														
	ASN									1		2		3
	NON ASN									2	1			3
JUMLAH														6
TANAMAN PANGAN														
	ASN					1				3	1		1	6
	NON ASN													0
JUMLAH														6
KETAHANAN PANGAN														
	ASN									2	2			4
	NON ASN										2			2
JUMLAH														6
PERIKANAN														
	ASN									2	1		1	4
	NON ASN										1			1
JUMLAH														5
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN														
	ASN								2	10	3	1		16
	NON ASN										2			2

JUMLAH														18
UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN														
	ASN									4				4
	NON ASN													0
JUMLAH														4
UPTD BALAI BENIH PADI														
	ASN										2			2
	NON ASN			1										1
JUMLAH														3
UPTD BALAI BENIH IKAN														
	ASN										2			2
	NON ASN	1		1		2				1				5
JUMLAH														7
UPTD RUMAH POTONG HEWAN														
	ASN					1				1				2
	NON ASN					1				4				5
JUMLAH														7
TOTAL														88

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo 2025

Berdasarkan rekapitulasi, jumlah keseluruhan SDM di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo adalah 88 orang, terdiri dari ASN dan non-ASN yang tersebar di sekretariat, enam bidang teknis serta empat UPTD.

Distribusi pendidikan menunjukkan bahwa:

- Jenjang Sarjana (S1) mendominasi dengan jumlah tertinggi, terutama pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Sekretariat.
- Jenjang Pascasarjana (S2) terdapat pada beberapa bidang teknis seperti Sekretariat dan Peternakan, menunjukkan adanya aparatur dengan kapasitas akademik lanjutan.
- Jenjang Diploma (D3) masih terbatas, umumnya pada bidang-bidang teknis lapangan.

- Jenjang SMA dan SMP umumnya dimiliki oleh tenaga non-ASN dan pelaksana di UPTD, sedangkan jenjang SD hanya ditemukan pada sebagian kecil tenaga pelaksana.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pendidikan SDM dinas telah cukup memadai, namun peningkatan kapasitas dan pemerataan kompetensi antarbidang masih diperlukan agar seluruh unit kerja memiliki kemampuan yang seimbang dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra.

Selanjutnya disajikan tabel komposisi SDM berdasarkan golongan ASN yang menggambarkan struktur kepangkatan dan jenjang karier aparatur di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.2.1.2. SDM Berdasarkan Golongan

BIDANG	GOLONGAN								JUMLAH
	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		
	L	p	L	p	L	p	L	p	
SEKRETARIAT			1		2	5	2		10
BINA PROGRAM DAN PENYULUHAN					2	1	1	1	5
PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA					1		2		3
TANAMAN PANGAN					4	1		1	6
KETAHANAN PANGAN					2	2			4
PERIKANAN					2	1		1	4
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					10	4	1	1	16
UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN					4				4
UPTD BALAI BENIH PADI						2			2
UPTD BALAI BENIH IKAN						2			2
UPTD RUMAH POTO HEWAN			1		1				2
JUMLAH	0	0	2	0	28	18	6	4	58

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo 2025

Struktur kepegawaian ASN pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo menunjukkan komposisi yang didominasi oleh pegawai dengan golongan III, diikuti oleh golongan IV, sedangkan golongan I dan II relatif sangat sedikit. Berdasarkan rekapitulasi, jumlah ASN seluruhnya tersebar pada berbagai bidang dan UPT dengan rincian golongan III sebanyak 46 orang (28 laki-laki dan 18 perempuan), golongan IV sebanyak 10 orang (6 laki-laki dan 4

perempuan) serta golongan I dan II tidak signifikan jumlahnya.

Komposisi ini menggambarkan bahwa mayoritas ASN berada pada jenjang karier menengah, yang umumnya menempati jabatan fungsional maupun struktural teknis di bidang Pertanian perikanan dan ketahanan pangan. Dominasi golongan III juga menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki masa kerja yang cukup matang dan pengalaman operasional yang kuat di lapangan.

Sementara itu, keberadaan ASN pada golongan IV mencerminkan adanya pejabat dengan tingkat senioritas dan tanggung jawab manajerial yang lebih tinggi, terutama di posisi kepala bidang atau pejabat pengawas. Namun demikian, minimnya pegawai di golongan I dan II menandakan bahwa regenerasi pegawai di tingkat pelaksana masih terbatas, sehingga perlu adanya kebijakan pengadaan dan pengembangan SDM baru untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dinas di masa mendatang.

Secara umum, struktur golongan ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur dinas telah berada pada tingkat yang cukup solid, dengan keseimbangan antara tenaga pelaksana teknis dan pejabat fungsional senior. Analisis ini menjadi dasar bagi strategi pembinaan karier, promosi jabatan serta pengembangan kompetensi ASN agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan arah pembangunan sektor pangan, Pertanian dan perikanan di Kabupaten Wonosobo.

Sebagai kelanjutan dari analisis ini, berikutnya akan disajikan tabel komposisi SDM berdasarkan jabatan untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai sebaran pegawai dalam jabatan struktural, fungsional dan pelaksana di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2.2.1.3. Tabel data pegawai berdasarkan Jabatan

Bidang	Jabatan	Jumlah
Sekretariat	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	1
	Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	1
	Kasubag	3
	Penata Layanan Operasional	2
	Pengolah Data dan Informasi	1
	Pengadministrasi Perkantoran	2
Bina Program dan Penyuluhan	Kepala Bidang	1
	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	1
	Perencana Ahli Muda	1
	Pranata Komputer	1

	Pengolah Data dan Informasi	1
Perkebunan dan Hortikultura	Kepala Bidang	1
	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	1
	Penelaah Teknis Kebijakan	1
Tanaman Pangan	Kepala Bidang	1
	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	1
	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	1
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	1
	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	1
	Pengadministrasi Perkantoran	1
Ketahanan Pangan	Kepala Bidang	1
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	2
	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1
Perikanan	Kepala Bidang	1
	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	1
	Analisis Akuakultur Ahli Muda	1
	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	1
Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Bidang	1
	Penelaah Teknis Kebijakan	6
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	1
	Medik Veteriner Ahli Muda	2
	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	1
	Pengelola Layanan Operasional	2
	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	1
	Paramedik Veteriner Mahir	1
	Medik Veteriner Ahli Pertama	1
Balai Penyuluh Pertanian	Kepala UPTD	1
	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	3
UPT Balai Benih Padi Sari Aji	Kepala UPTD	1
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1

UPT Rumah Potong Hewan (RPH)	Kepala UPTD	1
	Pengadministrasi Perkantoran	1
UPT Balai Benih Ikan (BBI)	Kepala UPTD	1
	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	1

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo 2025

Struktur jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo menunjukkan komposisi yang seimbang antara jabatan struktural, fungsional dan pelaksana. Jabatan struktural terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD yang bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program.

Sebagian besar ASN menempati jabatan fungsional teknis, seperti Penyuluh Pertanian Medik Veteriner, Analis Ketahanan Pangan, Analis Akuakultur dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang berperan langsung dalam mendukung kegiatan operasional di lapangan. Di sisi lain, jabatan pelaksana seperti Pengadministrasi Perkantoran, Pengolah Data dan Informasi serta Pengelola Layanan Operasional mendukung aspek administrasi dan pelayanan publik.

Komposisi ini mencerminkan keseimbangan antara tenaga manajerial dan teknis, meskipun penguatan jabatan fungsional tertentu masih diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan sektor pangan, Pertanian dan perikanan ke depan.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran mengenai regenerasi dan kesinambungan SDM, akan disajikan tabel SDM berdasarkan kelompok usia pada bagian berikut.

Tabel 2.2.1.4. Tabel data pegawai berdasarkan Umur

BIDANG		USIA (TAHUN)							
		<=30		31-40		41-50		>=51	
		L	P	L	P	L	P	L	P
SEKRETARIAT									
	ASN		1	1		1	2	3	2
	NON ASN	1	1	2		4		1	

BINA PROGRAM DAN PENYULUHAN									
	ASN			1		2	1	1	
	NON ASN	1							
PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA									
	ASN	1						2	
	NON ASN	1		1	1				
TANAMAN PANGAN									
	ASN					3	1	1	1
	NON ASN								
KETAHANAN PANGAN									
	ASN					2	2		
	NON ASN				1		1		
PERIKANAN									
	ASN	1				1			2
	NON ASN						1		
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN									
	ASN		2	1		9	2	1	1
	NON ASN				2				
UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN									
	ASN					3		1	
	NON ASN								
UPTD BALAI BENIH PADI							1		1
	ASN							1	
	NON ASN								
UPTD BALAI BENIH IKAN									
	ASN		1				1		
	NON ASN	3				1		1	
UPTD RUMAH POTO HEWAN									
	ASN					2			
	NON ASN	3		1				1	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo 2025

Struktur SDM di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo menunjukkan komposisi usia yang relatif

seimbang antara kelompok usia produktif dan menjelang pensiun. Sebagian besar pegawai berada pada rentang usia 41–50 tahun, diikuti oleh kelompok usia 31–40 tahun dan ≥ 51 tahun, sedangkan pegawai berusia ≤ 30 tahun masih relatif sedikit.

Kondisi ini menggambarkan bahwa mayoritas SDM dinas berada pada tahap karier yang matang dengan pengalaman kerja yang cukup panjang, terutama di bidang teknis dan penyuluhan. Namun, rendahnya proporsi pegawai muda menunjukkan perlunya regenerasi aparatur agar keberlanjutan pelaksanaan program dapat terjaga di masa mendatang..

2. Sarana Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai dan terdistribusi secara tepat merupakan faktor krusial dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil inventarisasi aset, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo memiliki total 133 unit sarana/aset yang terperinci di seluruh unit kerja. Aset ini dikelompokkan menjadi aset di Kantor Induk Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dan aset yang didistribusikan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP).

Aset sarana di lingkungan Kantor Induk Dinas, yang mencakup Kepala Dinas, Sekretariat, Keuangan dan seluruh Bidang teknis, berjumlah total 55 unit. Kelompok aset ini berfokus pada sarana mobilitas, administrasi dan manajerial.

Sarana mobilitas utama adalah Station Wagon dengan total 10 unit yang tersebar di tujuh ruangan, termasuk Kepala Dinas dan Sekretaris. Mobilitas lapangan didukung oleh 11 unit Sepeda Motor yang didistribusikan ke Bidang teknis dan unit Umum & Kepegawaian serta 1 unit Pick Up dan 1 unit kendaraan bermotor khusus lainnya di Bidang Perikanan.

Untuk mendukung fungsi administrasi dan teknis, tersedia 7 unit Printer (Peralatan Personal Komputer), 2 unit Alat Pemadam/Portable di Bidang Ketahanan Pangan, 3 unit Kursi Lipat di Aula serta berbagai aset kantor seperti Meja dan Lemari.

Dan untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kini memiliki total 78 unit sarana/aset. Aset ini mayoritas berorientasi pada operasional teknis, penyuluhan dan produksi.

Unit Unit Pengolahan Ikan Wadaslintang menjadi unit dengan aset terbanyak (total 15 unit), yang didominasi oleh sarana perairan, seperti 9 unit alat angkutan apung tak bermotor dan 5 unit perkakas konstruksi logam terpasang lainnya (Mesin Perahu).

Unit Balai Benih IkanKenjer diperkuat dengan 8 unit sarana budidaya dan mobilitas, termasuk 3 unit Pompa Air/Sumersible Pump dan 3 unit Sepeda Motor. Sementara BAPPELU memiliki 1 unit Station Wagon sebagai aset mobilitas utamanya di kelompok ini.

Mobilitas di Unit Pelaksana Lapangan ditunjang oleh 36 unit Sepeda Motor dan 7 unit alat angkutan darat bermotor lainnya yang terdistribusi di hampir seluruh BPP. Selain itu, alat pendukung teknologi seperti Global Positioning System tersedia di lima BPP dengan total 5 unit.

Rincian Sarana Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo di jabarkan dalam tabel berikut .

Tabel 2.2.2.1 Sarana Prasarana

Kelompok Unit Kerja	Nama Ruang/Unit Kerja	Jenis Sarana/Aset	Jumlah Unit	Subtotal Unit per Ruang
A. KANTOR INDUK DINAS (Total: 55 Unit)	BIDANG PERIKANAN	Station Wagon	3	13
		Pick Up	1	
		Sepeda Motor	4	
		kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	
		Meja Kerja Kayu	2	
		Lemari Besi	1	
		Kursi Lipat	1	
	BIDANG PETERNAKAN	Station Wagon	2	8
		Sepeda Motor	4	
		Meja Kerja Kayu	1	
		Lemari Besi	1	
	UMUM & KEPEGAWAIAN	Sepeda Motor	4	7
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	
	BIDANG KETAHANAN PANGAN	Station Wagon	1	7
		Sepeda Motor	2	
		Lemari Kayu	1	
		Meja Kerja Kayu	1	

		Alat Pemadam/Portable	2	
	BIDANG HORTIKULTURA	Station Wagon	1	5
		Meja Kerja Kayu	2	
		Lemari Kayu	1	
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	
	BIDANG BINA PROGRAM	Station Wagon	1	4
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	
	SEKRETARIS	Station Wagon	1	3
		Filing Cabinet Besi	2	
	AULA	Kursi Lipat	3	3
	KEUANGAN	mesin proses lainnya (dst)	1	2
		Sepeda Motor	1	
	BIDANG TANAMAN PANGAN	Meja Kerja Kayu	2	2
	KEPALA DINAS	Station Wagon	1	1
B. UNIT PELAKSANA TEKNIS/BALAI (Total: 78 Unit)	UPPU WADASLINTANG	alat angkutan apung tak bermotor untuk barang lainnya (dst)	9	15
		perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (Mesin Perahu)	5	
		Sepeda Motor	1	
	BBI KENJER	Pompa Air	2	8
		Sepeda Motor	3	
		Pick Up	1	
		Sumersible Pump	1	
		Sepeda	1	
	RPH NGASINAN	Pompa Air	2	7
		Gerobak Dorong	2	
		Sepeda Motor	2	
		alat laboratorium pertanian lainnya (dst)	1	
	BPP KEPIL	Sepeda Motor	2	7

		alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	2	
		Global Positioning System	1	
		Meja Kerja Kayu	2	
	BPP WADASLINTANG	Sepeda Motor	2	6
		alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	2	
		Meja Kerja Kayu	2	
	BPP KALIWIRO	Sepeda Motor	3	6
		alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1	
		Meja Kerja Kayu	2	
	BPP SELOMERTO	Sepeda Motor	3	6
		Meja Kerja Kayu	3	
	BPP KALIBAWANG	Sepeda Motor	3	6
		alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1	
		Meja Kerja Kayu	2	
	BPP LEKSONO	Sepeda Motor	3	6
		alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1	
		Meja Kerja Kayu	2	
	BPP WONOSOBO	Sepeda Motor	3	6
		alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1	
		Meja Kerja Kayu	2	
	UPT BPP SARIAJI	Transportable Water Pump	1	5
		Pick Up	1	
		Sepeda Motor	1	
		Gerobak Dorong	1	
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	
	BPP KALIKAJAR	Sepeda Motor	1	5
		alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1	
		Lemari Kayu	1	

		Meja Kerja Kayu	2	
	BPP GARUNG	Sepeda Motor	2	5
		Global Positioning System	1	
		Meja Kerja Kayu	2	
	BPP SAPURAN	Sepeda Motor	1	5
		alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1	
		Lemari Kayu	1	
		Meja Kerja Kayu	2	
	BPP WATUMALANG	Sepeda Motor	1	5
		Meja Kerja Kayu	2	
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	
	BPP KEJAJAR	Station Wagon	1	4
		Sepeda Motor	1	
		alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1	
		Global Positioning System	1	
	BPP MOJOTENGAH	Sepeda Motor	1	4
		Global Positioning System	1	
		Meja Kerja Kayu	2	
	RPH KERTEK	Sepeda Motor	1	3
		alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1	
		Global Positioning System	1	
	BPP SUKOHARJO	alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1	3
		Meja Kerja Kayu	2	
	BALAI PENYULUH PERTANIAN	Station Wagon	1	1
	GRAND TOTAL			133 Unit

Sumber: Sub Bagian Umum dan Aset Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo 2025

Selain aset bergerak (sarana) yang menunjang kegiatan operasional harian, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo juga memiliki aset berupa tanah yang tercatat oleh Sub Bagian Umum dan Aset Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo 2025 dengan total luas mencapai 184.858,0 M². Aset ini terdiri dari 25 bidang tanah yang digunakan untuk berbagai fungsi, mulai dari Kantor Dinas, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Balai Benih Ikan (BBI), hingga lahan produktif berupa sawah dan kebun/pertanian. Sebagian besar aset tanah ini diperoleh melalui mekanisme Hibah, sisanya melalui Pembelian dan Inventarisasi.

Aset tanah tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.1 Aset Tanah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Penggunaan	Asal Usul
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1300.0	1950.0	Kejajar, Kec. Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56354-Kelurahan Kejajar	BPP Kejajar	Hibah
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	35302.0	1952.0	Jl. Letjend. S. Parman KM 02 Kel, Ngasinan, Kramatan, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56315-Kelurahan Kramatan	Kantor Dinas, Sawah/ Pertanian	Hibah
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6265.0	1952.0	Pandansari, Kertek, Kec. Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56371-Kelurahan Kertek	BPP Kertek, Kantor Kecamatan, PLKB, Pertanian	Hibah
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7670.0	1953.0	Ngaglik, Pancurwening, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56316-Desa Pancurwening	Sawah	Pembelian
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9498.0	1954.0	Ngadisono, Kec. Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa	BPP Kaliwiro, Kebun/ Pertanian	Pembelian

				Tengah-Desa Ngadisono		
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9889.0	1954.0	Kertek - Kepil 62, Sawah Dan Hutan, Pecekelan, Kec. Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56373-Desa Pecekelan	BPP Sapuran, Kebun/ Pertanian	Pembelian
7	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	690.0	1982.0	Krakal Dawung, Kertek, Kec. Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56371-Desa Karangluhur	RPH Kertek	Hibah
8	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	2148.0	1987.0	Kramatan, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56315-Kelurahan Kramatan	RPH Tembelang	Hibah
9	Tanah Tambak/Empang /Kolam Ikan/Akuarium	10000.0	1986.0	Kerajan, Sudungdewo, Kec. Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah-Desa Sudung Dewo	BBI Sudungdewo	Pembelian
10	Tanah Tambak/Empang /Kolam Ikan/Akuarium	275.0	2008.0	Jl. Mayjend. Bambang Sugeng, Janjangan, Kramatan, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56315-Kelurahan Pagerkukuh	Belakang Ruko	Pembelian
11	Tanah Waduk	2227.0	1985.0	-Desa Ngadisono	DAM Desa Ngadisono	Hibah
12	Tanah Waduk	2715.0	1985.0	-Desa Lebak	DAM Desa Lebak	Hibah
13	Tanah Waduk	1700.0	1985.0	-Desa Tempuran	DAM Desa Tempuran	Hibah
14	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	379.0	1953.0	Rojoimo	Pertanian	Pembelian
15	Tanah Usaha	10415.0	1952.0	Jl. Mangga, Ngaglik, Pancurwening, Kec. Wonosobo, Kabupaten	Masjid, Sawah/ Kebun/ Pertanian	Pembelian

				Wonosobo, Jawa Tengah 56316-Kelurahan Rojoimo		
16	Tanah Usaha	6483.0	1953.0	Bumitirto, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah-Desa Bumitirto	Sawah	Hibah
17	Tanah Usaha	5138.0	1953.0	Jl. Lkr. Sel. 21, Ngaglik, Pancurwening, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56316-Desa Pancurwening	BPP Wonosobo, Kantor Bapeluh	Pembelian
18	Tanah Usaha	13217.0	1980.0	Jl. Desa Serang, Serangede, Serang, Kec. Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56354-Desa Serang	Kebun/ Pertanian	Hibah
19	Tanah Usaha	15820.0	1980.0	Kejajar, Kec. Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah-Kelurahan Kejajar	Kebun/ Pertanian	Hibah
20	Tanah Usaha	9517.0	2002.0	Pertanian (Banjaran Kramatan)	Pertanian	Inventarisasi
21	Tanah Usaha	246.0	1955.0	Kertek - Kepil, Sidodadi, Sapuran, Kec. Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56373-Kelurahan Sapuran	Ruko/ Kios	Hibah
22	Tanah Pertanian lainnya	5219.0	1953.0	Jl. Bumitirto, Bumitirto, Kec. Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56361-Desa Bumitirto	Kebun/ Pertanian/ Sawah dan Rumah Dinas	Hibah
23	Tanah Pertanian lainnya	4768.0	1954.0	Kertek - Kepil, Kedalon, Kec. Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa	Kebun/ Pertanian	Hibah

				Tengah 56372-Desa Kedalon		
24	Tanah Pertanian lainnya	3275.0	1955.0	Pecekelan, Kec. Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah-Desa Pecekelan	Kebun/ Pertanian	Pembelian
25	Tanah Lapangan Taman lainnya	8941.0	1952.0	Ngasinan, Kramatan, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah-Kelurahan Kramatan	Taman Jaksa, Kios/ Ruko, Sawah	Pembelian
Total	25 Bidang Tanah		184.858,0 M ²			

Sumber: Sub Bagian Umum dan Aset Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo 2025

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Capaian kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo periode 2020–2024 secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Beberapa indikator utama berhasil mencapai bahkan melampaui target, meskipun terdapat pula indikator yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

2.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo selama periode Renstra 2020–2024 merupakan gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah di bidang pangan, pertanian, dan perikanan. Capaian tersebut diukur melalui serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap capaian IKU ini menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta indikator kinerja pada periode Renstra 2025–2029. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian kinerja pada periode sebelumnya, disajikan tabel IKU Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo periode Renstra 2020–2024 berikut.

Tabel 2.3.1 Target dan Capaian IKU tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	TUJUAN																
1	Produktivitas sektor pertanian	Rp	N/A	N/A	38.088.475	39.638.598	41.251.809	35,390,178	36,754,722	40.786.156	40,930,293	51,291,956	N/A	N/A	107,08	103,26	103,81
B	SASARAN																
1	Tingkat konsumsi ikan	(kg/kap/th)	N/A	N/A	30,64	32,83	35,01	20,73	23,21	23,21	23,21	27,14	N/A	N/A	75,75	70,70	77,52
2	Skor PPH	Skor	N/A	N/A	87,38	87,53	87,68	86,80	87,70	88,66	88,60	96,06	N/A	N/A	101,39	101,22	109,56
3	Pertumbuhan petani ruta miskin yang dibina	%	N/A	N/A	20	16,67	13,29	N/A	18,39	12,74	12,74	13,19	N/A	N/A	63,70	76,42	99,25
4	Nilai SAKIP	Nilai	N/A	N/A	74,9	75,00	75,10	74,88	70,2	70,21	72,10	73,45	N/A	N/A	95,07	96,13	97,80
5	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	Skor	N/A	N/A	75,50	75,60	75,70	75,45	75,60	75,60	81,42	90,40	N/A	N/A	107,84	107,70	119,42

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Dari tabel capaian di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo selama periode 2020–2024 pada umumnya telah berjalan dengan baik. Sebagian besar indikator kinerja menunjukkan hasil yang positif, terutama pada aspek produktivitas Pertanian ketahanan pangan serta pelayanan publik yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian ini menggambarkan bahwa arah kebijakan dan strategi yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya memenuhi target, khususnya pada tingkat konsumsi ikan dan pemberdayaan petani ruta miskin. Hal ini menjadi catatan penting untuk terus dilakukan evaluasi, perbaikan dan penguatan program pada periode perencanaan berikutnya. Secara keseluruhan, kinerja yang dicapai tetap menunjukkan tren positif dengan rata-rata pencapaian yang cukup tinggi, menandakan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang sudah berjalan.

1. Produktivitas Sektor Pertanian

Produktivitas Sektor Pertanian dihitung berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dibagi tenaga kerja di sektor pertanian.

Data tabel 2.3.1. capaian produktivitas sektor pertanian menunjukkan bahwa produktivitas sektor pertanian Kabupaten Wonosobo mengalami tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun laju peningkatannya bervariasi setiap tahun, laju pertumbuhan secara keseluruhan sangatlah positif dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024.

2. Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan dihitung berdasarkan jumlah ikan segar dan ikan olahan yang dikonsumsi rumah tangga dibagi jumlah anggota rumah tangga.

Dari tabel 2.3.1. dilihat bahwa tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo masih stagnan meskipun ada kenaikan di tahun 2023 dari 23,21 menjadi 27,14 di tahun 2024 dan realisasi capaian tersebut juga belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 35,01 dengan skala capaian tinggi. Sehingga dapat disimpulkan “berhasil” meskipun capaiannya tidak memenuhi target.

Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Wonosobo di Tahun 2024 yang masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan nasional dan provinsi Jawa Tengah, meskipun lebih tinggi.

Tingkat konsumsi ikan yang tidak mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh menurunnya

daya beli masyarakat dalam situasi pandemi dan pasca pandemi pada saat itu. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan juga masih dipengaruhi adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa budidaya ikan yang ada belum memenuhi standar cara budidaya yang baik. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam pengolahan ikan yang masih terbatas menjadikan olahannya belum disukai sebagian masyarakat.

Selain kondisi sosial masyarakat, tingkat konsumsi ikan juga dipengaruhi infrastruktur distribusi dan pemasaran yang kurang memadai menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan ikan dalam kondisi segar. Belum semua wilayah kecamatan tersedia kios/pasar ikan segar.

Upaya peningkatan konsumsi ikan telah dilakukan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo antara lain melalui pembinaan cara budidaya ikan yang baik (CPIB) bagi pembudidaya secara simultan, peningkatan prasarana pemasaran hasil ikan dan secara terus menerus melakukan kampanye gerakan makan ikan bagi masyarakat. Selain itu juga mengenalkan budidaya ikan dalam ember dan aquaponic, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan konsumsi dan akhirnya dapat meningkatkan konsumsi ikan di Wonosobo.

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Capaian indikator Skor PPH pada tahun 2024 lebih tinggi daripada capaian tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, Realisasi Skor PPH Kabupaten Wonosobo tahun 2024 sudah memenuhi target, bahkan melebihi target yang ditetapkan yaitu 87,68 dengan skala capaian(109,56%) sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan “berhasil” karena capaiannya memenuhi target.

Capaian ini merupakan gambaran perbaikan pola konsumsi pangan oleh masyarakat. Keragaman bahan pangan yang tersedia di masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pangan. Selain itu juga dipengaruhi oleh mulai bergesernya cara pandang masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi yang beragam, Konsumsi masyarakat tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan semakin selektif dan terencana dalam memilih produk yang dikonsumsi. Perubahan ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya keberagaman, keseimbangan, kesehatan dan keamanan pangan.

4. Pertumbuhan Petani Ruta Miskin Yang Dibina

Pertumbuhan petani rumah tangga miskin yang dibina dalam empat tahun terakhir capaiannya cenderung fluktuatif. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah dukungan program kerja

yang dijalankan oleh dinas dan ketersediaan SDM dalam melakukan pembinaan.

5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dari tabel 2.3.1. capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan tren positif. Sejak tahun 2021 capaian kinerja indikator ini secara konsisten mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan sudah mulai terbangunnya sistem di internal Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat adanya perbedaan capaian antara tahun 2020 dengan capaian tahun-tahun selanjutnya. Capaian yang lebih tinggi pada Tahun 2020 karena metode pengukuran SAKIP masih menggunakan instrumen lama yang berbeda dengan tahun-tahun setelahnya.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dari tabel 2.3.1. capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut tidak lepas dari perbaikan dan peningkatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam memberikan layanan untuk masyarakat meliputi layanan permohonan data, layanan permohonan narasumber, layanan permohonan rekomendasi BBM bersubsidi jenis tertentu, layanan permohonan beras cadangan pangan, layanan permohonan surat keterangan kesehatan hewan, layanan permohonan Inseminasi Buatan dan layanan permohonan gerakan pengendalian hama penyakit tanaman. Upaya perbaikan dan peningkatan layanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo melakukan beberapa hal yaitu :

1. Penunjukan personil khusus yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman dalam pemberian layanan;
3. Peningkatan kapasitas bagi petugas pemberi layanan;
4. Pengelolaan data dukung layanan.

Beberapa indikator kinerja Utama lama masih akan digunakan pada rencana strategis periode 2025-2029. Namun juga terdapat sejumlah indikator kinerja baru yang disesuaikan dengan arah pembangunan lima tahun ke depan yaitu penguatan landasan agrobisnis Kabupaten Wonosobo. Indikator Kinerja Kunci perangkat daerah tersebut diharapkan mampu mengukur kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dengan lebih baik.

2.3.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo selama periode Renstra 2020–2024 juga diukur menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator ini berfungsi untuk menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih operasional pada setiap bidang urusan, serta menjadi tolok ukur kinerja unit pelaksana teknis di lingkungan dinas. Analisis terhadap capaian IKK memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan target kinerja pada periode Renstra 2025–2029, berikut disajikan tabel capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo periode 2020–2024.

Tabel 2.3.2. Target dan Capaian IKK tahun 2020 - 2024

	PROGRAM																
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan																
1	Rasio desa berlumbung pangan	%	N/A	N/A	6.8	7.5	9	N/A	N/A	14.34	14.34	15.09	N/A	N/A	210.88	191.2	167.67
2	Persentase desa mandiri pangan	%	N/A	N/A	17.3	19.2	21.1	N/A	N/A	16.6	16.6	14.11	N/A	N/A	95.95	86.46	85.83
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat																
1	Persentase ketersediaan pangan utama (beras)	%	N/A	N/A	265	265	265	N/A	N/A	104.11	104.25	107.8	N/A	N/A	39.29	39.34	40.68
2	Ketersediaan pangan per kapita per hari (kilo kalori)	%	N/A	N/A	2900	3000	3000	N/A	N/A	3314	3278.01	2777	N/A	N/A	114.28	109.27	92.57
	Program Penanganan Kerawanan Pangan																
1	Persentase desa berstatus rawan pangan	%	N/A	N/A	47	43	39	N/A	N/A	21.51	21.51	38.87	N/A	N/A	154.23	149.98	100.33
	Program Pengawasan Keamanan Pangan																
1	Persentase bahan pangan ASUH	%	N/A	N/A	90	92	93	N/A	N/A	90.2	90.2	90.66	N/A	N/A	100.22	98.04	97.48
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																
1	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	%	N/A	N/A	2.4	2.8	2	N/A	N/A	5.27	4.48	11.83	N/A	N/A	219.58	160	591.50
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya																
1	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	%	N/A	N/A	3.2	3.3	3	N/A	N/A	4.07	10.55	18.29	N/A	N/A	127.19	319.7	609.67
2	Persentase jumlah kelompok tani ikan yang	%	N/A	N/A	79	82	83	N/A	N/A	53.88	57.36	93.02	N/A	N/A	68.2	69.95	112.07

	aktif																
3	Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan	%	N/A	N/A	-2	2	4	N/A	N/A	0.58	0.03	4.27	N/A	N/A	-29	1.5	106.75
4	Persentase UPR aktif	%	N/A	N/A	84.62	85.58	86.54	N/A	N/A	64.1	76.92	85.9	N/A	N/A	75.75	89.88	99.26
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian																
1	Produksi tanaman pangan (Padi)	ton	161.084	161.966	162,016	162,076	162126	N/A	N/A	134,910.00	121,908.00	120,006.52	N/A	N/A	83.27	75.22	74.02
2	Produksi tanaman pangan (Jagung)	ton	72.557	74.008	75488	76990	78529	N/A	N/A	43,860.60	40,854.00	37,725.57	N/A	N/A	58.1	53.06	48.04
3	Produksi tanaman pangan (Ubi Kayu)	ton	139.86	144.055	146936	149874	152871	N/A	N/A	89,662.11	59,966.00	55,977.12	N/A	N/A	61.02	40.01	36.62
4	Produksi tanaman pangan (Ubi Jalar)	ton	15.726	16.355	17009	17519	18044	N/A	N/A	15,493.41	11,624.00	10,722.50	N/A	N/A	91.09	66.35	59.42
5	Produksi tanaman hortikultura (Bawang Putih)	ton	3.502	3.512	3582	3653	3689.9	N/A	N/A	2,392.11	6,152.60	3,292.73	N/A	N/A	66.78	168.41	89.24
6	Produksi tanaman hortikultura (kentang)	ton	53.372	53.426	53479	53532	53576.8	N/A	N/A	61,785.70	53,656.60	40,900.00	N/A	N/A	115.53	100.23	76.34
7	Produksi tanaman hortikultura (Kubis)	ton	58.624	58.681	58740	58798	58857.2	N/A	N/A	49,276.50	38,578.00	37,042.18	N/A	N/A	83.89	65.61	62.94
8	Produksi tanaman hortikultura (sawi)	ton	10.829	10.879	10929	10979	11039.2	N/A	N/A	8,595.40	8,876.00	8,697.01	N/A	N/A	78.65	80.85	78.78
9	Produksi tanaman hortikultura (Bawang Daun)	ton	36.083	36.103	36132	36153	36152.8	N/A	N/A	26,119.10	32,334.00	30,439.46	N/A	N/A	72.29	89.44	84.20
10	Produksi tanaman hortikultura (cabe)	ton	21.636	21.685	21725	21754	21773.4	N/A	N/A	22,326.60	20,246.00	46,960.29	N/A	N/A	102.77	93.07	215.68
11	Produksi tanaman hortikultura (Durian)	ton	14.532	15.935	16094	16416	16744.4	N/A	N/A	16,710.80	13,789.00	16,215.02	N/A	N/A	103.83	84	96.84
12	Produksi tanaman hortikultura (Salak)	ton	54.928	55.426	55918	56412	56932.4	N/A	N/A	61,415.70	19,005.00	41,867.05	N/A	N/A	109.83	33.69	73.54
13	Produksi tanaman hortikultura (Duku/ langsung)	ton	4.288	4.416	4460	4505	4551.8	N/A	N/A	1,361.56	1,516.00	18,476.19	N/A	N/A	30.53	33.65	405.91
14	Produksi tanaman	ton	883	910	937	965	994	N/A	N/A	442.6	1,489.00	1,010.94	N/A	N/A	47.24	154.3	101.70

	hortikultura (Manggis)																
15	Produksi tanaman hortikultura (Nangka)	ton	5.328	5.377	5425	5475	5523	N/A	N/A	7,501.70	3,993.00	8,709.99	N/A	N/A	138.28	171.56	157.70
16	Produksi tanaman hortikultura (Pisang)	ton	44.041	44.924	45823	46739	47673.6	N/A	N/A	97,661.20	47,370.00	46,336.33	N/A	N/A	213.13	101.35	97.19
17	Produksi tanaman hortikultura (Pepaya)	ton	4.315	4.531	4757	5475	5244.5	N/A	N/A	6,081.70	5,714.00	4,345.46	N/A	N/A	127.85	104.37	82.86
18	Produksi tanaman hortikultura (Nanas)	ton	349	356	363	370	378	N/A	N/A	526.6	1328	1,220.46	N/A	N/A	154.99	358.92	322.87
19	Produksi tanaman biofarmaka (Jahe)	ton	117.459	117.577	117.69	117.81	117.93	N/A	N/A	4,311.70	2,207.00	784.45	N/A	N/A	3663.61	1873.36	665.18
20	Produksi tanaman biofarmaka (Kapulaga)	ton	304.717	307.764	310.84	313.95	317.09	N/A	N/A	4,601.70	4,633.00	3,600.99	N/A	N/A	1480.41	1475.71	1135.64
21	Produksi bunga (Krisan)	tangkai	2.556.970	2.582.539	2608364	2634447	2660719	N/A	N/A	1,266,750.00	2,732,300.00	129,900.00	N/A	N/A	48.56	103.71	4.88
22	Produksi bunga (Mawar)	tangkai	29.54	29.835	30133	30434	30738	N/A	N/A	5,855.00	19,800.00	24,900.00	N/A	N/A	19.43	65.06	81.01
23	Produksi tanaman perkebunan (Kelapa)	ton	4.613.035	4.659.165	4705.76	4800341	4800.34	N/A	N/A	3,414.13	3,664.00	2,434.57	N/A	N/A	72.55	0.08	50.72
24	Produksi tanaman perkebunan (Kopi)	ton	521.863	537.518	553.64	587359	587.36	N/A	N/A	533.48	1,101.00	816.49	N/A	N/A	96.36	0	139.01
25	Produksi ternak (Sapi perah)	ekor	1.447	1.48	1512	1519	1528	N/A	N/A	1,423.00	936	291	N/A	N/A	94.11	61.62	19.04
26	Produksi ternak (Sapi Potong)	ekor	21.128	2.165	21933	22043	22173	N/A	N/A	21,977.00	19,134.00	12,298.00	N/A	N/A	100.2	86.8	55.46
27	Produksi ternak (Kambing)	ekor	191.16	197.2	200369	203374	206425	N/A	N/A	223,423.00	229,468.00	135,220.00	N/A	N/A	111.51	112.83	65.52
28	Produksi ternak (Domba)	ekor	112.911	112.976	112985	113111	113246	N/A	N/A	113,184.00	116,219.00	77,947.00	N/A	N/A	100.18	102.75	68.83
29	Produksi ternak (unggas)	ekor	2.579.785	2.840.362	2903653	2934076	2978083	N/A	N/A	2,902,278.00	9,505,679.00	17,851,328.00	N/A	N/A	99.95	323.98	599.42
30	Produksi ternak (Kelinci)	ekor	50655	512000	51583	52357	53142	N/A	N/A	32,835.00	32,485.00	3,947.00	N/A	N/A	63.65	62.05	7.43
31	Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	ekor	4.565	6000	7000	8500	10000	N/A	N/A	8,033.00	11,454.00	15,489.00	N/A	N/A	114.76	134.75	154.89
32	Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah	%	19,00	25,00	30	35	40	N/A	N/A	10.63	10.63	10.63	N/A	N/A	35.43	30.37	26.58

	lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim																
33	Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi	%	6,67	10,00	16.66	23.33	33.33	N/A	N/A	36.67	36.67	36.67	N/A	N/A	220.11	157.18	110.02
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
1	Persentase JUT yang berada di sentra produksi	%			100	95	96	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	106.38	105.26	104.17
2	Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi	%	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	100	100	N/A	N/A	0	100	0.00
3	Persentase jalan produksi yang berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura	%	94	95	100	86	88	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	119.05	116.28	113.64
4	Persentase tempat pemotongan hewan (ruminansia dan unggas) yang terstandar/tersertifikasi	%	32	34	2.59	37	42	N/A	N/A	2.59	6.03	6.67	N/A	N/A	7.62	16.3	15.88
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																
1	Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) / zoonosis yang ditangani	%	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian																
1	Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT yang tertangani)	%	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
	Program Perizinan Usaha Pertanian																

1	Persentase usaha pertanian yang berizin	%	N/A	10	27.63	5	276.30	N/A	N/A	27.63	27	27.63	N/A	N/A	0	552.6	276.30
	Program Penyuluhan Pertanian																
1	Persentase Gapoktan aktif	%	30	39	62.26	40	50	N/A	N/A	62.26	62.26	62.64	N/A	N/A	177.89	155.65	125.28
2	Persentase kelompok tani aktif	%	55	58	69.96	60	65	N/A	N/A	69.96	69.96	71.04	N/A	N/A	126.56	116.6	109.29
3	Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani	%	0	2	34.31	3	4	N/A	N/A	34.31	34.31	34.31	N/A	N/A	1715.5	1143.67	857.75
4	Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang	%	25	32	12.79	40	48	N/A	N/A	12.79	12.79	13.2	N/A	N/A	39.97	31.98	27.50

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo pada periode Renstra 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan pada periode perencanaan berikutnya. Kinerja positif dapat terlihat dari sejumlah indikator strategis yang berhasil melampaui target, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.

Pada aspek ketahanan pangan, indikator rasio desa berlumbung pangan dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya diversifikasi pangan dan peningkatan kemandirian masyarakat desa dalam penyediaan pangan. Meskipun demikian, indikator persentase desa mandiri pangan masih berfluktuasi, menandakan perlunya penguatan kelembagaan desa dan dukungan keberlanjutan program.

Dalam bidang perikanan, baik subsektor perikanan tangkap maupun budidaya mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya, peningkatan jumlah kelompok tani ikan aktif, serta naiknya persentase Unit Pembenihan Rakyat (UPR) aktif menunjukkan bahwa pembinaan dan bantuan sarana prasarana budidaya memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan masyarakat.

Pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, capaian produksi sejumlah komoditas unggulan seperti padi, cabai, kentang, dan bawang daun menunjukkan dinamika yang bervariasi. Beberapa komoditas hortikultura mengalami peningkatan signifikan yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi petani, namun komoditas tanaman pangan utama seperti padi dan jagung masih menghadapi tantangan akibat faktor cuaca, ketersediaan sarana produksi, dan luas lahan yang terbatas.

Sedangkan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, indikator terkait pengendalian penyakit hewan menular serta peningkatan populasi ternak menunjukkan hasil yang stabil, menandakan efektivitas kegiatan pengawasan kesehatan hewan serta pengembangan komoditas ternak unggulan lokal seperti domba Wonosobo.

Secara keseluruhan, capaian IKU periode 2020–2024 menggambarkan kemajuan yang cukup berarti dalam peningkatan ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan penguatan ekonomi berbasis agribisnis. Namun demikian, ke depan diperlukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan kualitas data, efisiensi pelaksanaan program, serta integrasi antarbidang untuk memastikan keberlanjutan capaian dan peningkatan kinerja pada

periode Renstra 2025–2029.

Beberapa indikator kinerja pada periode sebelumnya masih akan digunakan dalam Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029, dengan beberapa penyesuaian untuk memperkuat arah pembangunan lima tahun ke depan yang berfokus pada penguatan landasan agrobisnis daerah. Selain itu, sejumlah indikator kinerja baru juga ditetapkan agar mampu mengukur kinerja dinas secara lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan masa depan. Indikator tambahan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Selanjutnya, untuk melihat keterkaitan antara capaian kinerja dengan dukungan sumber daya yang dimiliki, akan dijelaskan alokasi anggaran dan realisasi penggunaan dana selama periode 2020–2024. Informasi ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Secara rinci, anggaran dan realisasi dimaksud disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi

No	Uraian	APBD pada Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	7,958,478,500	29,116,425,369	35,613,209,583	51,782,808,132	58,941,702,587	6,759,455,796	26,736,951,783	33,153,735,287	49,036,805,009	55,761,085,910	84.93	91.83	93.09	94.70	94.60	34,289,606,757	91.83

Selama periode tahun 2020–2024, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren peningkatan baik dalam alokasi maupun realisasi anggaran, seiring dengan bertambahnya skala dan cakupan program di bidang pangan, pertanian, dan perikanan. Total pendapatan yang dikelola terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, mencerminkan peningkatan dukungan pendanaan terhadap sektor strategis ini.

Secara umum, tingkat realisasi anggaran terhadap alokasi menunjukkan kinerja yang efektif, dengan rasio realisasi yang konsisten berada di atas 90 persen setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan juga memperlihatkan tren positif, menggambarkan pengelolaan keuangan yang efisien dan adaptif dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

Kinerja pengelolaan anggaran tersebut mencerminkan komitmen Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, produktivitas sektor pertanian, serta pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan agribisnis. Secara keseluruhan, realisasi anggaran periode 2020–2024 dapat dikategorikan efektif dan berorientasi hasil, serta menjadi landasan penting bagi perencanaan dan penganggaran pada periode Renstra 2025–2029 agar semakin tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, Pertanian serta sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo menetapkan kelompok sasaran pelayanan sebagai berikut:

1. Masyarakat umum, khususnya rumah tangga konsumen, sebagai penerima manfaat dari kebijakan ketahanan pangan, distribusi pangan serta program pangan bergizi, seimbang dan aman;
2. Petani dan kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok wanita tani dan asosiasi, sebagai pelaku utama dalam peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian;
3. Pelaku usaha agribisnis dan kelembagaan ekonomi petani, termasuk koperasi tani dan usaha kecil menengah di bidang pangan dan Pertanian yang membutuhkan dukungan penguatan daya saing dan akses pasar;
4. Peternak dan pelaku usaha peternakan dan medik veteriner, yang menjadi sasaran pelayanan melalui penyediaan sarana produksi, layanan kesehatan hewan serta pemotongan hewan yang higienis dan memenuhi standar;
5. Pembudidaya ikan, kelompok masyarakat pengawas, kelompok pengolahan dan pemasaran, nelayan dan penyuluh perikanan, yang menjadi sasaran program peningkatan produksi, pengembangan usaha budidaya serta layanan benih ikan berkualitas;
6. Penyuluh Pertanian penyuluh swadaya, penyuluh swasta dan kelembagaan penyuluhan, melalui dukungan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian dan mendampingi petani secara berkelanjutan;
7. Lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan mitra pembangunan, yang terlibat dalam kerjasama pembelajaran, transfer teknologi, riset terapan serta inovasi bidang pangan, Pertanian dan perikanan;
8. Perangkat daerah dan pemerintah desa, yang menjadi mitra dalam sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan, Pertanian dan perikanan;

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

2.5.1 Permasalahan

Pembangunan pangan, pertanian dan perikanan Kabupaten Wonosobo periode 2025-2029, pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Sehingga capaian kinerja yang telah diperoleh pada periode sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merumuskan dan

menetapkan sasaran dan target kinerja lima tahun kedepan. Beberapa persoalan mendasar yang diperkirakan masih akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan antara lain:

1. Belum optimalnya Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 berdasarkan data yang dirilis Badan Pangan Nasional adalah 77,87 sedikit meningkat dibanding Tahun 2023 yang sebesar 77,82. Apabila dibandingkan dengan indeks ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang sebesar 85,34 maka Kabupaten Wonosobo cukup rendah. Meskipun apabila dibandingkan dengan indeks ketahanan pangan nasional, Kabupaten Wonosobo masih sedikit diatas indek ketahanan pangan nasional yang ada diangka 76,20. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2.5.1.1 Data Indeks Ketahanan Pangan Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2024

Indikator	Nasional	Provinsi	Kabupaten Wonosobo
Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024	76,20	85,34	77,87

Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

2. Belum optimalnya capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Wonosobo disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Faktor Produksi dan Ketersediaan Pangan
 - a. Luas lahan pertanian terbatas dan topografi pegunungan membuat intensifikasi dan ekstensifikasi sulit dilakukan. Produktivitas padi, jagung dan komoditas pangan pokok di Wonosobo relatif lebih rendah dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah yang memiliki lahan sawah datar dan irigasi teknis. Berdasarkan data produktivitas padi tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo baru mencapai 5,2 Ton per hektar. Sedangkan produktivitas padi di Jawa Tengan mencapai 5,7 Ton per hektar.
 - b. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian (permukiman, pariwisata, infrastruktur) menyebabkan penurunan luas lahan sawah di Kabupaten Wonosobo.
 - c. Ketergantungan pada komoditas tertentu seperti kentang, sayuran dataran tinggi, kopi dan tembakau, yang bersifat fluktuatif harganya dan kurang menopang ketersediaan pangan pokok.
- Aksesibilitas dan Distribusi Pangan

- a. Akses jalan dan transportasi terbatas di beberapa wilayah kecamatan yang berbukit masih menjadi hambatan dalam distribusi pangan, meningkatkan biaya logistik dan membuat harga pangan lebih tinggi dibanding daerah dataran rendah.
 - b. Akses ekonomi rumah tangga miskin terhadap pangan masih rendah. Tingkat kemiskinan Wonosobo relatif lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi, sehingga daya beli pangan masyarakat terbatas.
 - c. Meskipun produksi padi lokal masih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tetapi belum mencukupi untuk kebutuhan tambahan Wonosobo sebagai daerah wisata. Sebagai gambaran pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan ke Wonosobo mencapai 2,5 juta lebih dengan rata-rata lama tinggal diatas 1,5 maka diperlukan kebutuhan pasokan beras dari luar daerah untuk memenuhinya.
- **Konsumsi dan Pemanfaatan Pangan**
 - a. Pola konsumsi masyarakat sebagian masih cenderung mengandalkan karbohidrat (beras, singkong) dengan konsumsi protein hewani rendah, terutama konsumsi ikan.
 - b. Prevalensi stunting dan gizi buruk masih relatif tinggi dibanding rata-rata provinsi, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan belum berbanding lurus dengan pemanfaatan untuk gizi keluarga.
 - c. Masih terbatasnya literasi gizi dan perilaku konsumsi sehat di kalangan rumah tangga pedesaan.
 - **Aspek Kerentanan Sosial dan Lingkungan**
 - a. Dengan kondisi geografis yang berbukit, Kabupaten Wonosobo cukup rentan terhadap bencana alam terutama tanah longsor, yang dapat menyebabkan pasokan pangan tidak stabil.
 - b. Fluktuasi harga komoditas hortikultura (kentang, cabai, tomat) berdampak pada pendapatan petani dan ketahanan ekonomi rumah tangga.
 - c. Infrastruktur irigasi dan penyimpanan hasil panen terbatas, sehingga hasil pertanian mudah rusak atau tidak bisa disimpan lama.
 - **Kelembagaan dan Kebijakan**
 - a. Kelembagaan perangkat daerah pengampu urusan pangan yang masuk ke struktur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak cukup efektif untuk melaksanakan fungsi koordinasi pada urusan pangan.
 - b. Program ketahanan pangan daerah belum terintegrasi sepenuhnya dengan pemberdayaan petani, perlindungan lahan

pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan diversifikasi pangan lokal.

- c. Dukungan inovasi dan teknologi pertanian masih minim, padahal kondisi agroklimat Wonosobo memerlukan pendekatan teknologi spesifik lokasi.
- d. Peran kelembagaan masyarakat (Gapoktan, BUMDes pangan, lumbung pangan desa) masih lemah dalam menjamin cadangan pangan lokal.

3. Masih tingginya Prevalensi Ketidacukupan Pangan / Prevalence of Undernourishment (PoU)

Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 13,39%. Angka ini menunjukkan proporsi penduduk di Kabupaten Wonosobo yang secara konsisten mengonsumsi makanan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi guna hidup sehat dan aktif pada tahun 2024. Dibandingkan dengan kondisi rata-rata di Jawa Tengah yang sebesar 8,63% maka Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Wonosobo masih cukup tinggi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masih tingginya jumlah rumah tangga yang belum mampu memenuhi kecukupan pangan di Kabupaten Wonosobo antara lain:

- a. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih cukup tinggi, sehingga daya beli pangan masyarakat rendah.
- b. Infrastruktur distribusi pangan terganggu oleh kondisi geografis (akses jalan dan transportasi di wilayah pegunungan), sehingga harga pangan lebih mahal dibanding kabupaten dataran rendah.
- c. Banyak rumah tangga petani masih subsisten, belum mampu mengakses pangan yang cukup dan bergizi

4. Masih rendahnya produksi perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Wonosobo secara umum terbagi menjadi dua subsektor utama, yakni perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap di Wonosobo relatif terbatas karena secara geografis Wonosobo tidak memiliki wilayah laut. Aktivitas tangkap hanya dilakukan di perairan darat seperti waduk, telaga dan sungai, dengan komoditas utama ikan nila, mujair dan karper. Volume produksinya cenderung kecil dan dengan pangsa pasar konsumen lokal.

Subsektor perikanan budidaya menjadi tulang punggung produksi perikanan Wonosobo. Budidaya ikan air tawar banyak berkembang di kolam tanah, kolam terpal, kolam beton, sawah (mina padi), hingga karamba jaring apung di Waduk Wadaslintang. Komoditas utama antara lain ikan nila, lele, gurame, patin dan karper. Meski budidaya ini telah menyebar di berbagai kecamatan, kontribusi produksinya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar seperti

Banjarnegara, Magelang, atau Temanggung. Produksi utama perikanan budidaya di Kabupaten Wonosobo dihasilkan dari budidaya keramba jaring apung di Waduk Wadslintang yang produksinya mencapai sekitar 5.000 Ton per tahun. Pada tahun 2024 tercatat produksi perikanan di Kabupaten Wonosobo mencapai 9.512,07 ton dengan rincian 8.930,9 ton hasil perikanan budidaya dan sebanyak 581,17 ton hasil perikanan tangkap.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya volume produksi perikanan budidaya di Wonosobo antara lain:

1. Keterbatasan Lahan dan Akses Air

Kontur wilayah Wonosobo yang didominasi perbukitan dan pegunungan membuat ketersediaan lahan datar untuk kolam budidaya cukup terbatas. Selain itu, akses terhadap sumber air stabil sepanjang tahun belum merata, sehingga tidak semua potensi lahan bisa dimanfaatkan optimal.

2. Suhu dan Iklim Dingin Pegunungan

Iklim sejuk khas pegunungan Wonosobo kurang ideal untuk pertumbuhan cepat beberapa komoditas ikan air tawar, khususnya lele dan patin yang lebih optimal di suhu hangat. Hal ini berdampak pada pertumbuhan yang lebih lambat dan produksi yang lebih rendah dibandingkan daerah tetangga dengan iklim lebih hangat.

3. Keterbatasan Sarana dan Teknologi Budidaya

Sebagian besar petani ikan masih mengandalkan metode budidaya tradisional dengan input pakan alami atau seadanya. Penggunaan teknologi intensif, pakan berkualitas, hingga sistem bioflok masih terbatas, sehingga produktivitas per satuan luas kolam rendah.

4. Permodalan dan Skala Usaha

Mayoritas pembudidaya ikan di Wonosobo merupakan usaha kecil rumah tangga dengan keterbatasan modal. Skala usaha kecil berdampak pada sulitnya memenuhi kebutuhan pasar dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

5. Rantai Pemasaran dan Akses Pasar

Pasar ikan segar di Wonosobo relatif kecil dan bergantung pada konsumsi lokal. Kurangnya akses distribusi ke luar daerah membuat motivasi pembudidaya untuk meningkatkan produksi menjadi terbatas

5. **Produksi hasil pertanian yang cenderung menurun**

Produksi pertanian di Kabupaten Wonosobo secara umum didominasi oleh dua sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan dengan komoditas utamanya padi dan kedua sub sektor hortikultura dengan komoditas utamanya sayur dan buah. Dalam lima tahun terakhir, produksi padi di Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren

penurunan. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena padi merupakan komoditas strategis sebagai sumber pangan utama masyarakat. Beberapa faktor penyebab penurunan produksi padi antara lain:

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan sawah di Wonosobo banyak beralih fungsi menjadi permukiman, infrastruktur, atau kebun hortikultura yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

2. Kondisi Topografi dan Fragmentasi Lahan

Sebagian besar sawah di Wonosobo berada di wilayah perbukitan dengan kepemilikan lahan sempit, sehingga produktivitas sulit ditingkatkan secara signifikan.

3. Keterbatasan Air Irigasi

Sistem irigasi belum merata dan masih banyak sawah yang bergantung pada tadah hujan. Perubahan pola curah hujan akibat iklim global turut memperburuk stabilitas produksi.

4. Menurunnya Minat Generasi Muda Bertani Padi

Banyak petani muda beralih profesi ke sektor non-Pertanian sehingga pengelolaan sawah cenderung stagnan dengan pola tanam tradisional.

Akibat kondisi tersebut, kontribusi padi terhadap total produksi pertanian Wonosobo semakin berkurang, sehingga tidak lagi menjadi komoditas unggulan dibandingkan sektor hortikultura.

Tabel 2.5.4.1 Data Luas Panen Beras Kabupaten Wonosobo

	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi beras	81.452,50	79.501,10	72.015,00	65.074,45	64.059,93
Luas sawah	27.813,00	27.117,60	24.514,35	23.405,29	22.485,53

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Berbeda dengan padi, hortikultura justru tumbuh menjadi andalan pertanian Wonosobo, terutama komoditas sayuran dataran tinggi (kentang, kubis, wortel, bawang daun, cabai) serta beberapa buah seperti carica, pisang dan durian. Namun, data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa produksi hortikultura bersifat fluktuatif. Faktor yang memengaruhi fluktuasi tersebut antara lain:

1. Ketergantungan pada Musim

Produksi sayuran sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ketika curah hujan terlalu tinggi, terjadi penurunan produktivitas akibat serangan penyakit dan hama.

2. Harga Pasar yang Tidak Stabil

Lonjakan harga memicu petani menanam komoditas tertentu secara

masif, namun saat harga jatuh, terjadi kerugian dan petani enggan menanam kembali.

3. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Tanaman hortikultura rentan terserang hama/penyakit, sehingga produksi sering menurun drastis dalam periode tertentu.

4. Teknologi Pascapanen yang Terbatas

Minimnya fasilitas penyimpanan (cold storage) dan pengolahan menyebabkan hasil panen berlimpah sering tidak terserap pasar, sehingga menurunkan motivasi produksi berikutnya.

Tabel 2.5.4.2 Data Hasil Panen Komoditas Hortikultura

No	Komoditas	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi tanaman hortikultura (Bawang Putih)	ton	N/A	N/A	2.392,11	6.152,60	3.292,73
2	Produksi tanaman hortikultura (kentang)	ton	N/A	N/A	61.785,70	53.656,60	40.900,00
3	Produksi tanaman hortikultura (Kubis)	ton	N/A	N/A	49.276,50	38.578,00	37.042,18
4	Produksi tanaman hortikultura (sawi)	ton	N/A	N/A	8.595,40	8.876,00	8.697,01
5	Produksi tanaman hortikultura (Bawang Daun)	ton	N/A	N/A	26.119,10	32.334,00	30.439,46
6	Produksi tanaman hortikultura (cabe)	ton	N/A	N/A	22.326,60	20.246,00	46.960,29
7	Produksi tanaman hortikultura (Durian)	ton	N/A	N/A	16.710,80	13.789,00	16.215,02
8	Produksi tanaman hortikultura (Salak)	ton	N/A	N/A	61.415,70	19.005,00	41.867,05
9	Produksi tanaman hortikultura (Duku/ langsung)	ton	N/A	N/A	1.361,56	1.516,00	18.476,19
10	Produksi tanaman hortikultura (Manggis)	ton	N/A	N/A	442,60	1.489,00	1.010,94
11	Produksi tanaman hortikultura (Nangka)	ton	N/A	N/A	7.501,70	3.993,00	8.709,99
12	Produksi tanaman hortikultura (Pisang)	ton	N/A	N/A	97.661,20	47.370,00	46.336,33
13	Produksi tanaman hortikultura (Pepaya)	ton	N/A	N/A	6.081,70	5.714,00	4.345,46

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

5. Produksi hasil peternakan yang masih rendah

Sektor peternakan di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu penopang ekonomi pedesaan dan penyedia kebutuhan pangan hewani. Komoditas utama yang diusahakan masyarakat meliputi sapi potong, sapi perah, kambing/domba, ayam ras pedaging, ayam ras

petelur, ayam buras serta itik. Dalam lima tahun terakhir, tren produksi peternakan Wonosobo menunjukkan pola yang relatif stabil, dengan kecenderungan meningkat pada komoditas unggas, namun stagnan bahkan menurun pada sapi perah dan sebagian ternak ruminansia kecil.

Terjadi tren peningkatan yang cukup stabil pada ternak Domba Wonosobo yang merupakan sumber daya genetik lokal. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya minat masyarakat untuk membudidayakan Domba Wonosobo dengan sejumlah keunggulan yang dimilikinya. Kegiatan kontes Domba Wonosobo yang dilaksanakan secara reguler dengan melibatkan Paguyuban Peternak Domba Wonosobo mempunyai pengaruh terhadap meningkatnya popularitas Domba Wonosobo.

Produksi hasil peternakan di Kabupaten Wonosobo sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor produksi peternakan saat ini antara lain:

1. Biaya Pakan Tinggi – tergantung pada pakan konsentrat yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah.
2. Skala Usaha Kecil – mayoritas peternak adalah usaha rumah tangga, sehingga sulit berkembang ke arah industri modern.
3. Permintaan Pasar – daging ayam lebih banyak diminati dibandingkan daging sapi atau kambing, sehingga unggas tumbuh lebih cepat.
4. Generasi Peternak Muda – minat generasi muda untuk beternak sapi perah rendah, menyebabkan stagnasi populasi.
5. Fluktuasi Harga Pasar – harga susu dan telur sering tidak stabil, membuat peternak sulit memperluas usahanya.

2.5.2 Isu Strategis

Identifikasi dan analisis isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam yang melimpah, didominasi oleh jenis tanah subur serta daya dukung air yang masih surplus. Dengan potensi tersebut, Dinas dihadapkan pada sejumlah tantangan utama yang bersumber dari isu internal (permasalahan PD), isu lingkungan strategis global, nasional dan regional (Isu KLHS dan Lingkungan Dinamis). Tantangan ini dikristalisasi menjadi Isu Strategis Perangkat Daerah (PD) yang secara umum menyoroti perlunya optimalisasi pemanfaatan potensi, penguatan ketahanan pangan dan gizi serta modernisasi dan digitalisasi di sektor Pertanian peternakan dan perikanan. Isu-isu strategis ini, beserta akar permasalahannya, secara lengkap dijabarkan melalui tabel berikut.

Tabel 2.5.2 Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi sumberdaya alam yang melimpah baik biotik maupun abiotik. tanahnya subur, sehingga cocok untuk budidaya Pertanian peternakan, perikanan	Belum Optimalnya indeks ketahanan pangan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah : Pengolahan limbah pertanian yang dapat diolah menjadi pupuk organik	Menghapus Kemiskinan	Isu Ekonomi: Rendahnya Produktivitas	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi
Daya dukung air		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Mengakhiri kelaparan	Isu Sosial: Kemiskinan Menuju Nol Persen	Penurunan tingkat kemiskinan	Modernisasi dan Keberlanjutan Produksi Sektor Hulu (Pertanian & Peternakan)
	Masih tingginya Prevalensi Ketidacukupan Pangan / Prevalence of Undernourishment (PoU)		Penanganan Perubahan Iklim	Isu Tata Kelola Pemerintahan Pemerintah Yang Lebih Efektif Dan Akuntabel , Memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Rendahnya produksi perikanan dan keterbatasan dalam aspek teknologi dan pemasaran
	Masih Rendahnya produksi perikanan		Kemitraan untuk menggapai tujuan		Penyediaan Prasarana Dan Sarana Berkualitas Yang Dan ramah	

					lingkungan	
	Produksi pertanian yang cenderung menurun					
	Produksi hasil peternakan yang masih rendah					

Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan dan isu lingkungan strategis, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dikelompokkan menjadi tiga pilar utama yang memerlukan intervensi kebijakan secara komprehensif:

1. Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi

Meskipun Kabupaten Wonosobo memiliki potensi lahan subur dan surplus air, isu strategis menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Pangan belum optimal dan Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU) masih tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya disrupsi pada aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan.

- Ketersediaan dan Akses: Isu strategis menyoroti masih panjangnya rantai distribusi, yang berpotensi menyebabkan inefisiensi dan fluktuasi harga serta perlunya optimalisasi lahan pertanian dan pekarangan untuk menjamin pasokan. Program Revitalisasi lumbung pangan menjadi krusial untuk menjaga stabilitas ketersediaan di tingkat lokal.
- Pemanfaatan dan Kualitas: Fokus strategis bergeser ke kualitas gizi dan keamanan, dengan isu kurangnya pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman. Ini memerlukan intervensi pada diversifikasi dan pengolahan lanjutan produk lokal serta jaminan kualitas pangan.
- Riset dan Inovasi: Isu Belum adanya penelitian tentang pangan dan Masih rendahnya inovasi teknologi pangan menunjukkan perlunya penguatan basis ilmu pengetahuan sebagai fondasi kebijakan.

2. Modernisasi dan Keberlanjutan Produksi Sektor Hulu (Pertanian & Peternakan)

Sektor pertanian dan peternakan menghadapi tantangan signifikan dari sisi produktivitas dan regenerasi. Produksi pertanian dan peternakan yang masih cenderung menurun atau rendah dipicu oleh faktor teknis dan kelembagaan.

- Efisiensi dan Infrastruktur: Isu Biaya pokok produksi pertanian yang masih tinggi dan rendahnya ketersediaan jaringan irigasi menunjukkan kebutuhan mendesak akan peningkatan efisiensi melalui perbaikan infrastruktur dan penerapan teknologi.
- Konservasi Lahan dan Lingkungan: Ancaman Alih fungsi lahan pertanian harus direspons dengan kebijakan perlindungan lahan. Selain itu, isu rendahnya praktik budidaya pertanian ramah lingkungan selaras dengan isu global mengenai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menuntut implementasi pertanian berkelanjutan.
- Regenerasi dan Kelembagaan: Isu rendahnya regenerasi pelaku usaha dan belum berfungsinya kelembagaan petani sebagai entitas ekonomi menjadi hambatan struktural yang memerlukan investasi serius dalam pengembangan sumber daya manusia dan penguatan organisasi petani.

- **Peternakan Khusus:** Sektor peternakan memiliki isu spesifik terkait input, yaitu populasi yang fluktuatif, menurunnya ketersediaan hijauan pakan ternak dan terbatasnya bibit unggul, yang secara langsung menyebabkan hasil produksi belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Isu Masih lemahnya mitigas kesehatan hewan juga menjadi perhatian utama.

3. Peningkatan Produktivitas dan Digitalisasi Sektor Perikanan

Sektor perikanan ditandai oleh masih rendahnya produksi perikanan dan keterbatasan dalam aspek teknologi dan pemasaran.

- **Teknologi dan Input:** Isu strategis rendahnya produksi benih ikan berkualitas dan minimnya penerapan teknologi dan inovasi di bidang perikanan menunjukkan perlunya penguatan unit pembenihan rakyat (UPR) dan diseminasi teknologi budidaya.
- **Akses Pasar:** Hambatan utama berada pada hilir, di mana pemasaran produk perikanan masih sangat konvensional dan digitalisasi belum optimal. Hal ini menuntut intervensi untuk menghubungkan produk perikanan lokal ke pasar yang lebih luas dan modern, sejalan dengan isu regional mengenai Perekonomian daerah yang berdaya saing.

Secara keseluruhan, isu-isu strategis ini menuntut Dinas untuk mengambil langkah transformatif dari pendekatan tradisional menuju sistem pangan, Pertanian dan perikanan yang modern, berkelanjutan dan berdaya saing, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi RPJMD

Penelaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Wonosobo 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur”**. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Visi dan Misi RPJMD

Unsur Visi	Penjelasan
Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Wonosobo terpenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi maupun sosial
Adil	Kondisi Wonosobo yang merata dan seimbang. Pembangunan di Wonosobo melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya dan hasil pembangunannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Makmur	Kondisi Wonosobo yang maju, aman dan lingkungan yang berkelanjutan (lestari). Maju : kemampuan daerah untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional, dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, teknologi dan inovasi. Aman : kondisi adanya kepastian, jaminan dalam berusaha. Berkelanjutan : keseimbangan

	pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lestari, tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.
--	--

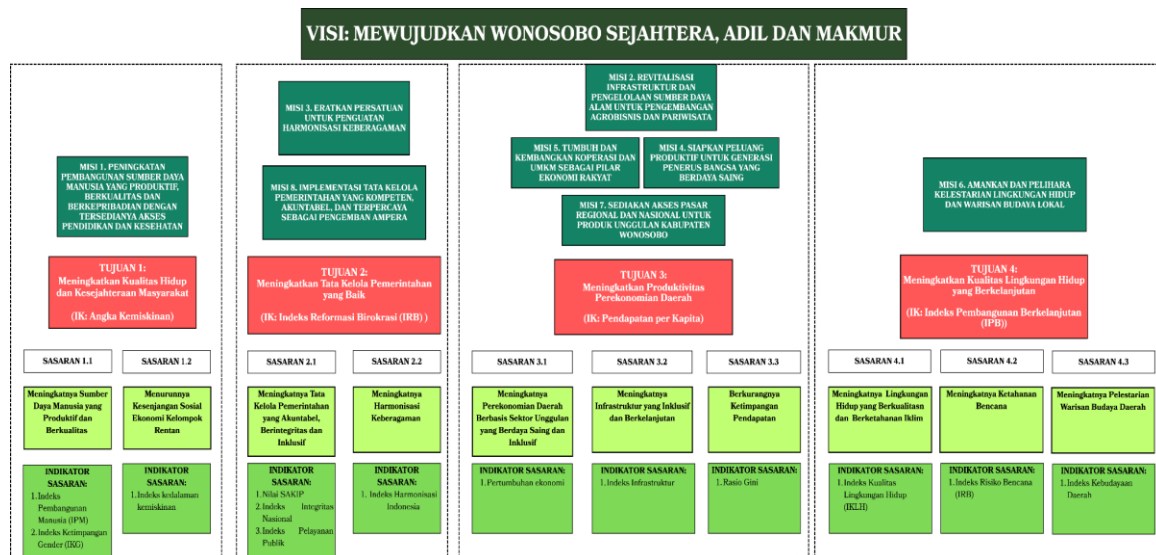
Visi "Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur" akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan;
2. Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
3. Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman;
4. Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing;
5. Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat;
6. Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal;
7. Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo;
8. Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tersebut, maka Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Wonosobo, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian visi dan seluruh misi yang lebih difokuskan pada pencapaian misi kedua Bupati dan Wakil Bupati yaitu "Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata".

3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo di tahun 2025-2029 secara operasional dijabarkan dalam 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:



Bagan 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD

3.3 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Pangan, Pertanian dan perikanan Kabupaten Wonosobo berada pada tujuan ke-3 (tiga) yaitu meningkatkan produktivitas perekonomian daerah dengan sasaran **Meningkatnya perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif**. Selanjutnya tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo beserta indikator dan targetnya dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : Urusan pertanian UU 12/1992, Sistem budidaya tanaman UU 39/2004, perkebunan UU 13/2010, Hortikultura UU 19/2013, Perlindungan dan pemberdayaan petani UU 22/2019, sistem budidaya pertanian berkelanjutan UU 41/2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) UU 18/2009 diubah 41/2014, peternakan dan												

kesehatan hewan Urusan Perikanan UU 31/2004 diubah 45/2009, perikanan PP 27/21, Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Urusan Pangan UU 18/2021: Pangan												
Rpjmd Yang Relevan: Meningkatnya perekonomian Daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif												
	T1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian		T1.1 Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	29.30	28.85	28.60	28.30	28.00	27.95	27.50	
		S1.1 Meningkatnya produktivitas petani	S1.1.1 Produktivitas petani	Juta Rp	51.29	52.32	54.41	56.59	58.85	61.20	63.65	
		S1.2 Meningkatnya produksi hasil peternakan	S1.2.1 Produksi Daging	Ton	13,078.00	13,339.00	13,606.00	13,878.00	14,156.00	14,439.00	14,727.00	

			S1.2.2 Produksi Telur	Ton	4,313.00	4,399.00	4,487.00	4,576.00	4,668.00	4,761.00	4,857.00	
			S1.2.3 Produksi Susu	Liter	147,341.00	148,814.00	150,302.00	151,805.00	153,323.00	154,856.00	156,405.00	
		S1.3 Meningkatkan akuntabilitas, pelayanan publik dan kematangan organisasi.	S1.3.1 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Angka	35.00	36.00	40.00	43.00	45.00	48.00	50.00	
			S1.3.2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67.80	68.50	70.00	73.00	76.00	79.00	82.00	
			S1.3.3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Perangkat Daerah	Angka	91.35	91.60	91.85	92.20	92.60	93.00	93.55	
		S1.4 Meningkatkan produksi Hasil perikanan	S1.4.1 Produksi ikan	Ton	9,512.07	9,696.52	9,893.69	10,104.23	10,328.85	10,568.27	10,823.31	
		S1.5 Meningkatkan Konsumsi Ikan	S1.5.1 Angka Konsumsi Ikan	Angka	25.42	27.14	27.41	27.66	27.95	28.23	28.31	
	T2 Meningkatkan Kemandirian Pangan		T2.1 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	77.87	78.23	78.54	81.46	84.85	88.38	88.50	
		S2.1 Meningkatkan Ketersediaan Pangan	S2.1.1 Rasio Cadangan Beras Pemerintah terhadap Perhitungan Cadangan Beras sesuai Peraturan Bapanas	%	44.81	53.06	53.64	54.23	54.24	54.84	54.85	

		S2.2 Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	S2.2.1 Rasio desa rentan rawan pangan	%	38.87	38.11	36.98	34.72	32.45	31.32	29.81	
		S2.3 Meningkatnya Keamanan dan Konsumsi Pangan	S2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan	Angka	96.06	96.72	97.38	98.03	98.69	99.34	100.00	
			S2.3.2 Prevalensi of Undernourishment (PoU)	%	13.39	11.86	10.68	9.49	8.36	7.26	6.33	

3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Tahunan

3.4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025–2029 yaitu *“Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur”*, diperlukan strategi yang terarah, adaptif dan berbasis pada potensi serta tantangan daerah. Strategi pembangunan disusun untuk memastikan keterpaduan antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan sehingga setiap langkah pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan kekuatan lokal, mengatasi berbagai hambatan serta menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi pedoman dalam mencapai misi pembangunan daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Wonosobo akan dicapai melalui strategi dan arah kebijakan berikut di bawah ini.

1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian berkelanjutan, melalui :
 - a. Penyediaan sarana produksi (saprodi) ramah lingkungan;
 - b. Peningkatan pengelolaan perbenihan berbasis masyarakat;
 - c. Penerapan modernisasi pertanian berbasis riset, teknologi dan inovasi , pertanian ramah lingkungan dan ekonomi sirkular;
 - d. Peningkatan kerangka regulasi Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - e. Peningkatan penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dan kemitraan;
 - f. Peningkatan kapasitas petani dan regenerasi petani;
 - g. Meningkatkan Produksi dan daya saing tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. Meningkatkan Produksi peternakan;
 - i. Meningkatkan Produksi perikanan;
 - j. Meningkatkan SDM Pertanian yang berkualitas;
2. Mewujudkan kemandirian pangan dicapai melalui :
 - a. Peningkatan ketersediaan pangan;
 - b. Peningkatan keterjangkauan pangan;
 - c. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pangan;
 - d. Penguatan regulasi terkait pangan.

Tabel 3.4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembagunan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(4)	(3)
1	Peningkatan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan sertifikasi Good Handling Practices (GHP) untuk meningkatkan mutu dan daya saing komoditas unggulan.	Meningkatkan pertumbuhan sektor Pertanian peternakan dan perikanan	Penyediaan sarana produksi (saprodi) ramah lingkungan
2	Fasilitasi hilirisasi, penguatan promosi dan pengembangan jaringan pemasaran produk peternakan berbasis digital untuk peningkatan nilai tambah.	-	Peningkatan pengelolaan perbenihan berbasis masyarakat
3	Implementasi standar dan prosedur pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, termasuk peningkatan produksi dan kualitas benih ikan.	-	Penerapan modernisasi pertanian berbasis riset, teknologi dan inovasi , pertanian ramah lingkungan dan ekonomi sirkular
4	Pelaksanaan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan terpadu untuk mendorong regenerasi pelaku usaha dan adopsi inovasi teknologi Pertanian peternakan dan perikanan.	-	Peningkatan kerangka regulasi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
5	Pengelolaan dan pemantauan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan penguatan lumbung pangan di tingkat desa sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga.	Mewujudkan kemandirian pangan	Peningkatan penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dan kemitraan
6	Intensifikasi pengawasan mutu dan keamanan pangan segar melalui pengujian residu pestisida dan cemaran di laboratorium serta pemberian sertifikasi keamanan pangan.	-	Peningkatan kapasitas petani dan regenerasi petani
7	Pengembangan sistem distribusi dan pemasaran yang efisien (memangkas rantai pasok) serta	-	Meningkatkan Produksi dan daya saing tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

	penguatan kelembagaan ekonomi petani.		
			Meningkatkan Produksi peternakan
			Meningkatkan Produksi perikanan
			Meningkatkan SDM Pertanian yang berkualitas
			Peningkatan ketersediaan pangan
			Peningkatan keterjangkauan pangan
			Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pangan
			Penguatan regulasi terkait pangan

3.4.2 Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka menetapkan prioritas dan fokus pelaksanaan strategi serta kebijakan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun maka ditetapkan penahapan pembangunan. Fokus kebijakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2026-2030 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.4.2 Penahapan Rencana Strategis

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kemandirian pangan melalui penguatan produksi pangan, Pertanian dan perikanan yang berkelanjutan	Kemandirian pangan melalui peningkatan produksi pangan, Pertanian dan perikanan yang berkelanjutan	Kemandirian pangan melalui pengembangan produksi pangan, Pertanian dan perikanan yang berkelanjutan	Kemandirian pangan melalui pemantapan produksi pangan, Pertanian dan perikanan yang berkelanjutan	Kemandirian pangan melalui pemantapan produksi pangan, Pertanian dan perikanan yang berkelanjutan

Berdasarkan penahapan rencana strategis sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo pada periode 2026–2030 disusun secara bertahap dengan tema strategis yang berbeda setiap tahunnya. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai fokus dan langkah yang ditempuh, uraian arah kebijakan tahunan disajikan sebagai berikut.

3.4.2.1 Arah Kebijakan Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 difokuskan pada kebijakan **“Kemandirian pangan melalui penguatan produksi pangan, Pertanian dan perikanan yang berkelanjutan”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian berkelanjutan melalui penyediaan sarana produksi (saprodi) ramah lingkungan, peningkatan pengelolaan perbenihan berbasis masyarakat, penerapan modernisasi pertanian berbasis riset, teknologi, dan inovasi yang mendukung pertanian ramah lingkungan serta ekonomi sirkular, penguatan kerangka regulasi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dan kemitraan, peningkatan kapasitas serta regenerasi petani, serta peningkatan produksi dan daya saing tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas. Penguatan kemandirian pangan dalam rangka pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan;
2. Peningkatan akses petani pada pupuk bersubsidi untuk pemupukan berimbang;
3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengolahan pupuk organik;
4. Peningkatan ketersediaan benih dan bibit berkualitas bagi petani;

3.4.2.2 Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 difokuskan pada kebijakan **“Kemandirian pangan melalui pengembangan produksi pangan, Pertanian dan perikanan yang berkelanjutan”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi pertanian;
2. Peningkatan kualitas jalan pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi;
3. Inisiasi pembangunan unit pengolahan pupuk organik di sentra produksi;
4. Pengembangan unit pembibitan/ pembenihan di kawasan sentra budidaya;

3.4.2.3 Arah Kebijakan Tahun 2028

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2028 difokuskan pada kebijakan **“Pengembangan budidaya Pertanian Ramah**

Lingkungan”. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

1. Pengembangan budidaya Pertanian Ramah Lingkungan;
2. Pengembangan unit pengolahan pupuk organik di sentra produksi;
3. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam budidaya pertanian;

3.4.2.4 Arah Kebijakan Tahun 2029

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2029 difokuskan pada kebijakan **“Kemandirian pangan melalui pemantapan produksi pangan, Pertanian dan perikanan yang berkelanjutan”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan produktivitas pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui pengembangan asosiasi dan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya) berbasis komoditas;
3. P4S berbasis komoditas;
4. Pengembangan kebun belajar tani dan pertanian modern untuk generasi muda.

3.4.2.5 Arah Kebijakan Tahun 2030

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2029 difokuskan pada kebijakan **“Kemandirian pangan melalui pemantapan produksi pangan, Pertanian dan perikanan yang berkelanjutan”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. Penyiapan hilirisasi komoditas strategis
 - Tanaman Pangan : Padi (beras kemasan dan pengolahan limbahnya), singkong (beras analog)
 - Perkebunan dan hortikultura : Kopi (greenbean, Roasted bean, pengolahan limbah kopi), kelapa (gula kelapa, cocopeat, briket), Kakao
 - Biofarmaka : kapulaga, jahe
 - Sayuran : Kentang, cabe , bawang putih, Tomat
 - Buah : carika, salak, durian , alpokat (minyak nabati)

BAB IV.

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memperhatikan arah kebijakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan program kegiatan juga memperhatikan kapasitas riil fiskal agar penentuan target dan anggaran dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Pagu indikatif merupakan wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan. Perumusan indikasi program pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program pembangunan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja setiap tahun.

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo pada lima tahun mendatang diprioritaskan pada program yang dapat menunjang tujuan dan sasaran. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo ini dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, di mana program tahun 2030 sebagai pijakan penyusunan Renja tahun 2030 dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

4.1.1.1.1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Produktivitas Tanaman dengan produktivitas komoditas unggulan (padi, ubi kayu, kentang, cabe, bawang daun, bawang merah, salak, kopi,

kelapa, kapulaga) sebagai indikator kinerja.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

4.1.1.1.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Produksi Tanaman dengan Produksi komoditas unggulan (padi, ubi kayu, kentang, cabe, bawang daun, bawang merah, salak, kopi, kelapa, kapulaga) sebagai indikator kinerja

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian;
2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian;
3. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian;
4. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum;

4.1.1.1.3 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Pengendalian dan Penanganan Bencana Pertanian dengan Persentase pengendalian hama penyakit yang tertangani sebagai indikator kinerja.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;

4.1.1.1.4 Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Kelembagaan Pertanian dengan Rasio kelembagaan petani yang memiliki usaha produktif, Jumlah kelembagaan asosiasi komoditas dan Rasio Petani Muda sebagai indikator kinerja.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;

4.1.1.1.5 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan \ Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang tertangani sebagai indikator kinerja.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;

4.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

4.1.1.2.1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan produksi perikanan tangkap sebagai indikator kinerjanya.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
4. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
5. Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
7. Kegiatan Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan

kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

4.1.1.2.2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya dengan produksi perikanan budidaya sebagai indikator kinerjanya.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;

4.1.1.2.3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada peningkatan Pengawasan Kelautan dan Perikanan yang Sesuai Dengan Aturan dengan Persentase wilayah perairan umum yang sudah diawasi secara reguler (1 bulan sekali) sebagai indikator kinerjanya.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota;

4.1.1.2.4 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada Tercapainya Angka Konsumsi Ikan yang Ditetapkan dengan PRasio UPI yang bersertifikat dan Pertumbuhan pemasaran hasil olahan perikanan yang diproduksi UPI sebagai indikator kinerjanya.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil;
2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Kegiatan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
5. Kegiatan Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;

6. Kegiatan Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
7. Kegiatan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;

4.1.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

4.1.1.3.1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada Meningkatnya infrastruktur kemandirian pangan dengan Persentase desa yang ada RMU sebagai indikator kinerjanya.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

4.1.1.3.2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Rasio lumbung pangan aktif sebagai indikator kinerjanya.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

4.1.1.3.3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dan Meningkatnya Diversifikasi dan Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan dengan Rasio lumbung pangan aktif dan Angka Konsumsi Energi sebagai indikator kinerjanya.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan;

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
3. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
4. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;

4.1.1.3.4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada Meningkatkan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dengan Rasio Keamanan Pangan dan Jumlah Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Teregistrasi sebagai indikator kinerjanya.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

4.2 Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai kerangka logis (logical framework) perencanaan lima tahunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, disusunlah matriks kinerja yang merangkum keselarasan antara regulasi pusat (NSPK) dan dokumen perencanaan daerah (Sasaran RPJMD) dengan Tujuan strategis Dinas, Sasaran serta Indikator Kinerja Utama yang terukur. Matriks ini menjabarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu 2025 hingga 2030, mencakup Bidang Pertanian Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pangan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.1 Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK : Urusan pertanian • UU 12/1992, Sistem budidaya tanaman • UU 39/2004, perkebunan • UU 13/2010, Hortikultura • UU 19/2013, Perlindungan dan pemberdayaan petani • UU 22/2019, sistem budidaya pertanian berkelanjutan • UU 41/2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)							

- UU 18/2009 diubah 41/2014, peternakan dan kesehatan hewan Urusan Perikanan - UU 31/2004 diubah 45/2009, perikanan - PP 27/21, Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Urusan Pangan - UU 18/2021: Pangan							
RPJMD Meningkatnya perekonomian Daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif							
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
	T1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian				T1.1 Rasio PDRB Sektor Pertanian		

		S1.1 Meningkatnya produktivitas petani			S1.1.1 Produktivitas petani		
			OC1.1.1 Meningkatnya Produktivitas Tanaman		OC1.1.1.1 Produktivitas padi	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					OC1.1.1.2 Produktivitas ubi kayu		
					OC1.1.1.3 Produktivitas kentang		
					OC1.1.1.4 Produktivitas cabe		
					OC1.1.1.5 Produktivitas bawang daun		
					OC1.1.1.6 Produktivitas bawang merah		
					OC1.1.1.7 Produktivitas salak		
					OC1.1.1.8 Produktivitas kopi		
					OC1.1.1.9 Produktivitas kelapa		

					OC1.1.1.10 Produktivitas kapulaga		
						3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
				Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3.27.02.2.01.0003 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	3.27.02.2.01.0004 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	
				Tersedianya benih bersertifikat	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan	3.27.02.2.01.0008 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	

				Perkebunan Berbentuk Batang	Berbentuk Batang		
				Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	3.27.02.2.01.0011 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	
				Tersedianya benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	3.27.02.2.01.0015 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	
						3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			OC1.1.2 Meningkatnya produksi tanaman		OC1.1.2.1 Produksi padi	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					OC1.1.2.2 Produksi ubi kayu		
					OC1.1.2.3 Produksi kentang		
					OC1.1.2.4 Produksi cabe		

					OC1.1.2.5 Produksi bawang daun		
					OC1.1.2.6 Produksi bawang merah		
					OC1.1.2.7 Produksi salak		
					OC1.1.2.8 Produksi kopi		
					OC1.1.2.9 Produksi kelapa		
					OC1.1.2.10 Produksi kapulaga		
						3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	

				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0008 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
				terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	

				Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
						3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	

				Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	

				terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			OC1.1.3 Meningkatnya Pengendalian dan Penanganan Bencana Pertanian		OC1.1.3.1 Persentase pengendalian hama dan penyakit yang tertangani	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
						3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			OC1.1.4 Meningkatnya Kelembagaan Pertanian		OC1.1.4 .1 Rasio kelembagaan petani yang	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

					memiliki usaha produktif		
					OC1.1.4 .2 Jumlah kelembagaan asosiasi komoditas		
					OC1.1.4 .3 Rasio Petani Muda		
						3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				Terbentuknya dan Terselenggaranya	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah	

				Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedia dan meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
		S1.2 Meningkatnya produksi hasil peternakan			S1.2.1 Produksi Daging		
					S1.2.2 Produksi Telur		
					S1.2.3 Produksi Susu		
			OC1.2.1 Meningkatnya Populasi Ternak		OC1.2.1.1 Jumlah Populasi Ternak Besar	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					OC1.2.1.2 Jumlah Populasi Ternak Kecil		
					OC1.2.1.3 Jumlah Populasi Unggas		
					OC1.2.1.4 Jumlah Populasi Domba Wonosobo		
						3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	

						Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
				Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
				Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
						3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			OC1.2.2 Meningkatkan Prasarana Peternakan		OC1.2.2.1 Rasio Tempat Pemotongan Hewan (Ruminansia	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

					dan Unggas) yang berizin		
						3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	
				Terbangun, ter rehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
				Terbangun, ter rehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
						3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
						3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	
				Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	3.27.03.2.04.0001 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	

				Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	
			OC1.2.3 Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		OC1.2.3.1 Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang tertangani	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
						3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
				Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
				Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	

						3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
						3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
				Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
		S1.3 Meningkatnya akuntabilitas, pelayanan publik dan kematangan organisasi.			S1.3.1 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah		

					S1.3.2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					S1.3.3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Perangkat Daerah		
			OC1.3.1 Meningkatnya layanan penunjang Perangkat Daerah		OC1.3.1.1 Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					OC1.3.1.2 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		
					OC1.3.1.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		
					OC1.3.1.4 Persentase keterisian data statistik sektoral		
					OC1.3.1.5 Nilai hasil pengawasan kearsipan		
					OC1.3.1.6 Persentase keselarasan program		

					perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		
						X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

						X.XX.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
						X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						X.XX.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						X.XX.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	
						X.XX.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	
						X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
						X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						X.XX.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	

						X.XX.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

						X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
						X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						X.XX.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		S1.4 Meningkatnya produksi Hasil perikanan			S1.4.1 Produksi ikan		
			OC1.4.1 Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		OC1.4.1.1 Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
						3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
						3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Penyaluran Bantuan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi	3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,	

				Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
						3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			OC1.4.2 Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		OC1.4.2.1 Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
						3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0008 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			OC1.4.3 Meningkatnya Pengawasan Kelautan dan Perikanan yang Sesuai Dengan Aturan		OC1.4.3.1 Persentase wilayah perairan umum yang sudah diawasi secara reguler (1 bulan sekali)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
						3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di	

						Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
				Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan	3.25.05.2.01.0003 Operasi Kapal Pengawas Perikanan	
				Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
				Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
				Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

				Kabupaten/Kota Yang Diawasi			
				Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	3.25.05.2.01.0008 Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	
				Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	
				Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	3.25.05.2.01.0011 Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	
		S1.5 Meningkatnya Konsumsi Ikan			S1.5.1 Angka Konsumsi Ikan		
			OC1.5.1 Tercapainya Angka Konsumsi Ikan yang Ditetapkan		OC1.5.1.1 Rasio UPI yang bersertifikat	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
					OC1.5.1.2 Pertumbuhan pemasaran hasil olahan perikanan yang diproduksi UPI		

						3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
						3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

						3.25.06.3.04 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	3.25.06.3.04.0001 Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
						3.25.06.3.05 Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	3.25.06.3.05.0001 Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
						3.25.06.3.06 Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	

				Terlaksananya fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	3.25.06.3.06.0001 Fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
						3.25.06.4.04 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	3.25.06.4.04.0001 Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
	T2 Meningkatkan Kemandirian Pangan				T2.1 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
		S2.1 Meningkatnya			S2.1.1 Rasio Cadangan Beras Pemerintah		

		Ketersediaan Pangan			terhadap Perhitungan Cadangan Beras sesuai Peraturan Bapanas		
			OC2.1.1 Meningkatnya infrastruktur kemandirian pangan		OC2.1.1.1 Persentase desa yang ada RMU	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
						2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
				Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

			OC2.1.2 Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		OC2.1.2.1 Rasio lambung pangan aktif	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
						2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
				Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	
				Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemantauan stok,	Jumlah koordinasi dan	2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok,	

				pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
						2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
				Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	2.09.03.2.02.0008 Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
						2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
		S2.2 Meningkatnya Keterjangkauan Pangan			S2.2.1 Rasio desa rentan rawan pangan		
			OC2.2.1 Tertanganinya Desa Rentan Rawan Pangan		OC2.2.1.1 Persentase Desa Sangat Tahan Pangan	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
						2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
				Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	2.09.04.2.02.0008 Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	
		S2.3 Meningkatnya Keamanan dan Konsumsi Pangan			S2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan		
					S2.3.2 Prevalensi of Undernourishment (PoU)		
			OC2.3.1 Meningkatnya Diversifikasi dan		OC2.3.1.1 Angka Konsumsi Energi	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

			Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan				
						2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0020 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	

						2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
				Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
				Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

			OC2.3.2 Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		OC2.3.2.1 Rasio Keamanan Pangan	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
					OC2.3.2.2 Jumlah Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Teregistrasi		
						2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
				Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
						2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2.1 Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Setelah menetapkan kerangka logis perencanaan yang menghubungkan antara Tujuan, Sasaran, Outcome dan serangkaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, langkah selanjutnya adalah memastikan rencana tersebut dapat diimplementasikan dengan dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, Tabel Kinerja dan Pendanaan disajikan untuk mengintegrasikan target kinerja lima tahunan dengan estimasi kebutuhan anggaran.

Tabel ini merinci target kinerja spesifik untuk setiap indikator Sub Kegiatan dari tahun 2025 hingga 2030, sekaligus menampilkan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk Pagu Indikatif. Pagu Indikatif ini merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang diusulkan dan harus diperjuangkan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo untuk setiap program. Dengan demikian, tabel ini berfungsi ganda: sebagai alat ukur keberhasilan (kinerja) dan sebagai dasar pengajuan serta penetapan kebutuhan fiskal (Pagu Indikatif) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Rincian target kinerja beserta proyeksi kebutuhan anggaran lima tahunan disajikan secara lengkap pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.2 Target Dan Pagu Indikatif Tahun

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1 4
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
	T1.1 Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	29.30	28.60		28.30		28.00		27.95		27.50		
	S1.1.1 Produktivitas petani	Juta Rp	51.29	54.41		56.59		58.85		61.20		63.65		
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					7.000.000.000		7.000.000.000		7.300.000.000		7.300.000.000		7.500.000.000	
	OC1.1.1.1 Produktivitas padi	Ton/Ha	5,33	5,37		5,38		5,4		5,41		5,42		
	OC1.1.1.2 Produktivitas ubi kayu	Ton/Ha	21,16	21,56		21,76		21,96		22,16		22,36		
	OC1.1.1.3 Produktivitas kentang	Ton/Ha	14,4	14,6		14,7		14,8		14,9		15		
	OC1.1.1.4 Produktivitas cabe	Ton/Ha	4,6	4,8		4,9		5		5,1		5,2		
	OC1.1.1.5 Produktivitas bawang daun	Ton/Ha	11,8	11,85		11,88		11,9		11,93		11,95		
	OC1.1.1.6 Produktivitas bawang merah	Ton/Ha	7,2	7,3		7,35		7,4		7,45		7,50		

	OC1.1.1.7 Produktivitas salak	Ton/Ha	6,08	6,22		6,29		6,36		6,43		6.50		
	OC1.1.1.8 Produktivitas kopi	Ton/Ha	2,4	2,53		2,6		2,67		2,74		2.80		
	OC1.1.1.9 Produktivitas kelapa	Ton/Ha	1,1	1,12		1,13		1,14		1,15		1.16		
	OC1.1.1.10 Produktivitas kapulaga	Ton/Ha	5,02	5,15		5,21		5,27		5,34		5.40		
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					6.250.000.000		6.250.000.000		6.450.000.000		6.450.000.000		6.550.000.000	
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
3.27.02.2.01.0003 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
3.27.02.2.01.0004 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek														
3.27.02.2.01.0008 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
3.27.02.2.01.0011 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji														
3.27.02.2.01.0015 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota					250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000	

3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.215.000.000		1.225.000.000		1.225.000.000		1.225.000.000		1.225.000.000	
	OC1.1.2.1 Produksi padi	Ton	120.006,52	120.670,60		121.043,61		121.416,62		121.646,72		121.871,57		
	OC1.1.2.2 Produksi ubi kayu	Ton	55.977,12	57.035,32		57.564,42		58.093,52		58.622,62		59.151,72		
	OC1.1.2.3 Produksi kentang	Ton	40.900,00	41.610,00		41.895,00		42.180,00		42.465,00		42.750,00		
	OC1.1.2.4 Produksi cabe	Ton	46.960,29	48.998,40		50.019,20		51.040,00		52.060,80		53.081,60		
	OC1.1.2.5 Produksi bawang daun	Ton	30.439,46	30.568,44		30.632,93		30.697,42		30.761,91		30.826,40		
	OC1.1.2.6 Produksi bawang merah	Ton	854,15	868,7		874,65		880,6		886,55		892,5		
	OC1.1.2.7 Produksi salak	Ton	21.269,00	23.449,15		24.621,61		25.852,69		27.145,32		28.502,59		
	OC1.1.2.8 Produksi kopi	Ton	816,49	898,66		944,56		994,08		1.047,58		1.105,44		
	OC1.1.2.9 Produksi kelapa	Ton	2.434.567,00	2.726.715,00		2.751.061,00		2.775.406,00		2.799.752,00		2.824.098,00		
	OC1.1.2.10 Produksi kapulaga	Ton	3.601,00	3.687,73		3.732,87		3.778,02		3.823,17		3.869,75		
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian					303.750.000		306.250.000		306.250.000		306.250.000		306.250.000	
3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
3.27.03.2.01.0008 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														
3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan														
3.27.03.2.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
3.27.03.2.01.0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota														
3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														
3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian					911.250.000		918.750.000		918.750.000		918.750.000		918.750.000	
3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian														
3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air														
3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	OC1.1.3.1 Persentase pengendalian hama penyakit yang tertangani	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman														

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					890.000.000		900.000.000		900.000.000		950.000.000		950.000.000	
OC1.1.4 .1 Rasio kelembagaan petani yang memiliki usaha produktif	%	17,78	22.22		25.18		28.15		31.11		34.07			
OC1.1.4 .2 Jumlah kelembagaan asosiasi komoditas	Angka	N/A	3.00		5.00		7.00		8.00		10.00			
OC1.1.4 .3 Rasio Petani Muda	%	18,51	18.91		19.11		19.31		19.51		19.71			
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					890.000.000		900.000.000		900.000.000		950.000.000		950.000.000	
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														

	S1.2.1 Produksi Daging	Ton	13.078,00	13,606.0 0		13,878.0 0		14,156.0 0		14,439.0 0		14,727.0 0		
	S1.2.2 Produksi Telur	Ton	4.313,00	4,487.00		4,576.00		4,668.00		4,761.00		4,857.00		
	S1.2.3 Produksi Susu	Liter	147.341,00	150,302. 00		151,805. 00		153,323. 00		154,856. 00		156,405. 00		
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
	OC1.2.1.1 Jumlah Populasi Ternak Besar	Ekor	12,589.00	13,918.0 0		14,047.0 0		14,178.0 0		14,309.0 0		14,367.0 0		
	OC1.2.1.2 Jumlah Populasi Ternak Kecil	Ekor	227,850.00	234,018. 00		236,325. 00		238,651. 00		240,993. 00		244,122. 00		
	OC1.2.1.3 Jumlah Populasi Unggas	Ekor	17,851,328.00	18,708,9 46.00		18,947,3 24.00		19,189,5 09.00		19,435,5 16.00		19,477,0 26.00		
	OC1.2.1.4 Jumlah Populasi Domba Wonosobo	Ekor	15,489.00	17,039.0 0		17,550.0 0		1,807,70 0.00		18,619.0 0		19,178.0 0		
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota					400.000.000		400.000.000		425.000.000		425.000.000		450.000.000	
3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota														

3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan														
3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		125.000.000		125.000.000		150.000.000	
3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
	OC1.2.2.1 Rasio Tempat Pemotongan Hewan (Ruminansia dan Unggas) yang berizin	%	23.76	29.31		32.81		35.76		39.06		41.16		
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian														
3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas														
3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota														
3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														

3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum														
3.27.03.2.04.0001 Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum														
3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum														
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					100.525.000		100.525.000		100.525.000		100.525.000		100.525.000	
	OC1.2.3.1 Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang tertangani	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					100.525.000		100.525.000		100.525.000		100.525.000		100.525.000	
3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis														
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota														
3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan														
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan														

Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner													
3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan													
3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan													
S1.3.1 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Angka	35	40		43		45		48		50		
S1.3.2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,8	70		73		76		79		82		
S1.3.3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Perangkat Daerah	Angka	91,35	91,85		92,2		92,6		93		93,55		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.042.968.000		3.077.169.000		3.087.913.000		3.304.266.000		3.186.283.000
OC1.3.1.1 Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100		
OC1.3.1.2 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		
OC1.3.1.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Angka	90	90,5		91		91,5		92		92,5		
OC1.3.1.4 Persentase keterisian data statistik sektoral	%	100	100		100		100		100		100		

	OC1.3.1.5 Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka	65,64	70		73		75		76		76,5		
	OC1.3.1.6 Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	%	100	100		100		100		100		100		
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0										
X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
X.XX.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														

X.XX.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					500.000.000		642.169.000		652.913.000		669.266.000		669.266.000	
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
X.XX.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material														
X.XX.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu														
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		332.017.000	
X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel														
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
X.XX.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
X.XX.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.031.662.608		1.400.000.000		1.400.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000	
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					271.391.392		425.000.000		425.000.000		475.000.000		475.000.000	
X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel														
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
X.XX.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	S1.4.1 Produksi ikan	Ton	9.512,07	9.893,69		10,104.2 3		10,328.8 5		10,568.2 7		10,823.3 1	
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					80.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000
	OC1.4.1.1 Produksi Perikanan Tangkap	Ton	581.170	616.560		635.06		654.11		673.74		693.95	
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													
3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap													
3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil													
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil													
3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha													
3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana													

Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										20.000.000		20.000.000		
3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.125.000.000		1.125.000.000		1.130.000.000		1.150.000.000		1.140.000.000	
	OC1.4.2.1 Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8.290,90	8,967,44		8981.23		9340.48		9354.85		9729.05		
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					525.000.000		525.000.000		500.000.000		520.000.000		520.000.000	
3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi														

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
3.25.04.2.04.0008 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.125.000.000		1.125.000.000		1.130.000.000		1.150.000.000		1.140.000.000	
	OC1.4.3.1 Persentase wilayah perairan umum yang sudah diawasi secara reguler (1 bulan sekali)	%	45.45	63.63		72.72		81.81		90.09		100.00		
3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota					1.125.000.000		1.125.000.000		1.130.000.000		1.150.000.000		1.140.000.000	
3.25.05.2.01.0003 Operasi Kapal Pengawas Perikanan														
3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
3.25.05.2.01.0008 Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan														
3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya														

Manusia Pengawasan sumber daya perikanan														
3.25.05.2.01.0011 Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan														
	S1.5.1 Angka Konsumsi Ikan	Angka	25.42	27.41		27.66		27.95		28.23		28.31		
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		300.000.000	
	OC1.5.1.1 Rasio UPI yang bersertifikat	%	N/A	42.85		57.14		71.43		85.71		100.00		
	OC1.5.1.2 Pertumbuhan pemasaran hasil olahan perikanan yang diproduksi UPI	%	N/A	1.10		1.20		1.30		1.40		1.50		
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil											50.000.000			
3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							25.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000	
3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku					50.000.000									

Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
3.25.06.3.04 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil					50.000.000				50.000.000				100.000.000	
3.25.06.3.04.0001 Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
3.25.06.3.05 Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil							25.000.000				25.000.000			
3.25.06.3.05.0001 Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
3.25.06.3.06 Fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil											25.000.000		100.000.000	
3.25.06.3.06.0001 Fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
3.25.06.4.04 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil							50.000.000							
3.25.06.4.04.0001 Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan														

untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil														
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
	T2.1 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	77.87	78.20		81.46		84.85		88.38		88.50		
	S2.1.1 Rasio Cadangan Beras Pemerintah terhadap Perhitungan Cadangan Beras sesuai Peraturan Bapanas	%	44.81	53.64		54.23		54.24		54.84		54.85		
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					80.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		200.000.000	
	OC2.1.1.1 Persentase desa yang ada RMU	%	63.02	65.28		66.42		67.17		67.92		70.00		
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN					125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		65.000.000	

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
	OC2.1.2.1 Rasio lumbung pangan aktif	%	15.00	25.00		30.00		35.00		40.00		45.00		
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan														
2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota														
2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan														
2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota														
2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														
2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														

2.09.03.2.02.0008 Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)														
2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi														
2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal														
	S2.2.1 Rasio Desa Rentan Rawan Pangan	%	38.87	36.98		34.72		32.45		31.32		29.81		
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					125.000.000									
	OC2.2.1.1 Persentase Desa Sangat Tahan Pangan	%	23.02	23.77		24.53		25.28		26.04		26.41		
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					125.000.000									
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan														

Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
	S2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan	Angka	96.06	97.38		98.03		98.69		99.34		100.00		
	S2.3.2 Prevalensi of Undernourishm ent (PoU)	%	13.39	10.68		10.16		9.90		9.32		8.83		
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
	OC2.3.1.1 Angka Konsumsi Energi	Kg/kal/h ari	1,995.70	2,030.50		2,047.90		2,065.20		2,082.60		2,100.00		
	OC2.3.1.2 Angka Konsumsi Protein	Kkal/perk apita/hari	61.49	61.51		61.53		61.54		61.56		61.57		
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan														
2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
2.09.03.2.01.0020 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi														
2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														
	OC2.3.2.1 Rasio Keamanan Pangan	%	90.66	91.56		92.16		92.86		93.66		94.56		
	OC2.3.2.2 Jumlah Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Teregistrasi	Angka	30	52		64		76		88		100		
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota														
2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														

2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

4.3 Subkegiatan Prioritas

Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan pertanian di Kabupaten Wonosobo dalam lima tahun mendatang perlu diarahkan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang mampu menjawab tantangan produksi, ketahanan pangan serta regenerasi petani.

Pertama, peningkatan produksi Pertanian peternakan dan perikanan menjadi hal yang sangat mendesak. Upaya ini dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan Pertanian penerapan teknologi budidaya modern, penyediaan benih/bibit unggul, perbaikan infrastruktur irigasi serta penguatan sistem pascapanen dan pemasaran. Pada sektor peternakan dan perikanan, dibutuhkan dukungan berupa pengembangan sentra-sentra produksi, peningkatan kualitas pakan, pengendalian penyakit hewan dan ikan serta fasilitasi akses pasar yang lebih luas. Dengan langkah tersebut, diharapkan produktivitas komoditas unggulan Wonosobo dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kedua, peningkatan indeks ketahanan pangan masyarakat juga menjadi prioritas penting. Hal ini dapat ditempuh melalui program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga. Pemanfaatan pekarangan tidak hanya mampu menyediakan sumber pangan alternatif seperti sayuran, buah, tanaman obat keluarga, maupun ternak kecil, tetapi juga berperan dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi dan berkelanjutan bagi keluarga. Program Gerakan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan sejenisnya perlu terus dikembangkan dengan dukungan pembinaan teknis, bibit dan sarana produksi yang memadai.

Ketiga, membangun minat generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan langkah strategis untuk keberlanjutan pembangunan pertanian di Wonosobo. Regenerasi petani perlu ditopang oleh program pendidikan, pelatihan dan inkubasi agribisnis berbasis teknologi digital. Kegiatan seperti sekolah lapang, kebun belajar tani, magang agribisnis, hingga fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi petani muda perlu diperluas. Selain itu, pencitraan pertanian sebagai sektor modern, menguntungkan dan berdaya saing harus terus digelorakan agar mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian.

Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas tersebut secara konsisten, pembangunan pertanian Kabupaten Wonosobo diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi Pertanian peternakan dan perikanan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan serta menciptakan regenerasi petani yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Tabel berikut menampilkan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Wonosobo dalam rentang lima tahun kedepan.

Tabel 4.3 Subkegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS		OUTCOME	Program	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Sub kegiatan	KET
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)
	PROGRAM TAKTIS						
1	Pengembangan Urban Farming Di 30 Kelompok Wanita Tani (KWT)		Meningkatnya Diversifikasi dan Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
2	Sekolah Lapang Pertanian Modern Bagi 60 Petani Muda		Meningkatnya Kelembagaan Pertanian	Program penyuluhan pertanian	Keg. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
3	Pengembangan Smart Farming Bagi 30 Kelompok Petani muda		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
4	Peningkatan Infrastruktur Pertanian		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
5	Pembangunan RMU, Driyer, Gudang		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen	

	Penyimpanan			Prasarana Pertanian		Tanaman Pangan	
6	Penyediaan Sistem Informasi Stok Dan Distribusi Real Time, System Informasi Harga		Meningkatnya Diversifikasi dan Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok Pangan	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
						Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
7	Fasilitasi Kerjasama Dengan BUMDes, Koperasi, Retail Untuk Membeli Gabah Petani		Meningkatnya Diversifikasi dan Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
8	Pengaturan Pola Tanam Dan Jadwal Panen		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di	

						Kabupaten/Kota	
9	Pelatihan Penanganan Paska Panen Padi Bagi Petani/ Poktan/ Gapoktan		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
10	Peningkatan Standar Kualitas Padi		Meningkatnya Produktivitas Tanaman	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
11	Bantuan Pangan Beras Bagi Korban Bencana, Masyarakat		Meningkatnya Diversifikasi dan Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
12	Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah		Meningkatnya Diversifikasi dan Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
13	Diversifikasi Tanaman Pangan Dan Tanaman Konservasi (Agroforestry)		Meningkatnya Kelembagaan Pertanian Meningkatkan Produktivitas Tanaman	Program penyuluhan Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	

				Sarana Pertanian			
14	Pemeliharaan Dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
15	Pembangunan Embung, Bendung, Sumur Resapan		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
16	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Perpompaan		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
17	Pembangunan Drainase Pertanian		Meningkatnya Produksi Tanaman	rogram Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	

18	Cetak Sawah Baru		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
19	Perbanyak Ternak Sapi Potong Dan Sapi Perah		Meningkatnya Produktivitas Ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
20	Pengawasan Kesehatan Hewan		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
21	Pengembangan Lahan Hijauan Pakan Ternak		Meningkatnya Produktivitas Ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan	

				Pertanian	Kabupaten/Kota	Ternak	
22	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak (Silase, konsentrat)		Meningkatnya Produktivitas Ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
23	Pengembangan RPH Modern Dan berstandar halal		Meningkatnya Produksi Ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
24	Pengembangan Poskeswan Di Sentra Peternakan		Meningkatnya Produksi Ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
25	Pelatihan Juru Sembelih Halal		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
26	Pelatihan Pemerahan Higienis & Standar Mutu Susu Segar		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
27	Pelatihan pembuatan		Meningkatnya Produktivitas	Program Penyediaan dan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari	

	pakan ternak		Ternak	Pengembangan Sarana Pertanian	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Daerah Kabupaten/Kota Lain	
28	Penyusunan Juknis/Juklak Perda LP2B		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
29	Pelatihan manajemen usaha tani bagi Kelompok Wanita Tani (KWT)		Meningkatnya Kelembagaan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
30	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		Meningkatnya Diversifikasi dan Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
31	Pelatihan P2L		Meningkatnya Diversifikasi dan Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
32	Pasar Tani		Meningkatnya Kelembagaan	Program	Pelaksanaan Penyuluhan	Pengembangan Kapasitas	

			Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Pertanian	Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
33	Pengadaan benih padi varietas Ciherang		Meningkatnya Produktivitas Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
34	Pengadaan benih jagung varietas Pioner		Meningkatnya Produktivitas Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
35	Pengadaan Power Tresher		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
36	Pengadaan Corn Seller		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
37	Pengadaan Traktor Roda 2		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
38	Pelatihan juru sembelih		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan	Program Pengendalian Kesehatan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet	

			dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Masyarakat Veteriner	dan Kesejahteraan Hewan	
39	Bintek/Sosialisasi penyembelihan hewan yang ASUH		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
40	Sosialisasi Standarisasi Rumah Potong Unggas		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
41	Penerapan pelayanan RPH sesuai standar		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
42	Pengembangan pertanian tumpang sari di hutan rakyat		Meningkatnya Produktivitas Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	

43	Pelatihan teknologi tepat guna		Meningkatnya Produktivitas Tanaman, Meningkatkan Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
44	Pelatihan pasca panen		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	
						Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	

45	Asuransi Usaha Tani Padi		Meningkatnya Pengendalian dan Penanganan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
46	Pendataan petani millenial		Meningkatnya Kelembagaan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
47	Sekolah lapang pertanian modern bagi petani muda		Meningkatnya Kelembagaan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
48	Pengembangan smart farming bagi kelompok petani muda		Meningkatnya Produksi Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
49	Pasar Pangan Murah		Meningkatnya Diversifikasi dan Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan	Meningkatnya Diversifikasi dan Keseimbangan Gizi Dalam Konsumsi Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
49	Pemuliaan dan sertifikasi bibit tanaman unggul padi Serta Peningkatan		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang		Keg 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sub Keg 1. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk	

	Kuantitas Dan Kualitas Genetik Domba Wonosobo		diperbanyak			Biji/Benih	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Keg 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Keg 2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
50	Penanganan Kemiskinan Dan Stunting Terintegrasi		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		Keg 5.1 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Sub keg 5.1 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Keg 5.2 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sub Keg 5.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
51	Penanganan Kemiskinan Dan Stunting Terintegrasi		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota		2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
	PROGRAM STRATEGIS						
	Penanggulangan kemiskinan						
1	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana pertanian				Pengurangan Beban Pengeluaran : Program Mayo Sekolah,Pembangunan RTLH, Jaminan Kesehatan, Bantuan Sosial, Bagi Keluarga Miskin Dan Kelompok Rentan	
	Ketahanan Pangan						
2	Pengadaan dan Pengelolaan gabah/beras dalam negeri	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana pertanian				Pembangunan driyer, RMU, gudang penyimpan	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				Fasilitasi Kerjasa ma Dengan BUMDes, Koperasi, Retail untuk mmebeli gabah petani	

		Program penyuluhan pertanian				Pengaturan pola tanan dan jadwal panen	
		Program penyuluhan pertanian				Pelatihan Penanganan Paska Panen Padi Bagi Petani/poktan/gapoktan	
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				Peningkatan standar kualitas padi	
3	Penyaluran cadangan beras pemerintah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian pangan				Bantuan Pangan Beras Bagi Korban Bencana, Masyarakat berpenghasilan rendah	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian pangan				Penyediaan cadangan beras pemerintah	
4	Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat	Program penyuluhan Pertanian program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				Difersifikasi tanaman pangan dan tanaman konservasi (agroforestry)	
5	Layanan irigasi pendukung lumbung pangan	program penyediaan dan pengembangan				Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur irigasi;	

	nasional	prasarana pertanian				Pengembangan embung, bendung, sumur respan; Pembangunan jaringan irigasi usaha tani, perpompaan; Pembangunan drainase pertanian; cetak sawah baru	
6	Peningkatan produksi daging sapi dan susu sapi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				Perbanyak Ternak Sapi Potong Dan Sapi Perah Pengawasan Kesehatan Hewan	
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				Pengembangan Lahan Hijauan Pakan Ternak	
7		Program Penyuluhan Pertanian				Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak (Silase, Konsentrat)	
8		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				Pengembangan RPH Modern Dan Berstandar Halal, Pengembangan Poskeswan Di Sentra Peternakan	
9		Program Pengendalian Kesehatan				Pelatihan Juru Sembelih Halal	

		Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					
10		Program Penyuluhan Pertanian				Pelatihan Pemerahan Higienis & Standar Mutu Susu Segar.	
11	Kemudahan Perizinan	Program Perizinan Usaha Pertanian				Sosialisasi Masif OSS-RBA Ke Pelaku Usaha, Terutama UMKM	
						Integrasi Data OSS Dengan Sistem Sektoral (Sertifikasi Halal, BPOM, NIB, SIUP, Dll)	
						Skema Pembebasan Biaya Izin Untuk Sektor Prioritas (Pertanian dan Pariwisata).	
	PROGRAM DELEGASI						
1	Menyusun Peraturan Daerah dan Rencana Aksi Daerah Tentang Ekonomi Hijau					Penyusunan Perda LP2B Rencana Aksi Daerah tentang Investasi Hijau	

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, terukur, dapat dicapai, relevan, berkesinambungan, dapat diperbandingkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan serta Indikator Sasaran Perangkat Daerah.

4.4.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun dalam dokumen ini merupakan tolok ukur penting untuk mengukur capaian kinerja strategis dalam berbagai aspek pembangunan berupa indikator tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan. IKU ini dirancang dengan mengacu pada kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setiap indikator memiliki target kuantitatif yang jelas yang akan dicapai secara bertahap selama periode tahun 2025 hingga 2030, yang menggambarkan arah dan kemajuan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berikut IKU Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo beserta targetnya.

Tabel 4.4.1 Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	T1.1 Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	29.30	28.85	28.60	28.30	28.00	27.95	27.50	
2	S1.1.1 Produktivitas petani	Juta Rp	51.29	52.32	54.41	56.59	58.85	61.20	63.65	
3	S1.2.1 Produksi Daging	Ton	13,078.00	13,339.00	13,606.00	13,878.00	14,156.00	14,439.00	14,727.00	
4	S1.2.2 Produksi Telur	Ton	4,313.00	4,399.00	4,487.00	4,576.00	4,668.00	4,761.00	4,857.00	
5	S1.2.3 Produksi Susu	Liter	147,341.00	148,814.00	150,302.00	151,805.00	153,323.00	154,856.00	156,405.00	
6	S1.3.1 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Angka	35.00	36.00	40.00	43.00	45.00	48.00	50.00	
7	S1.3.2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67.80	68.50	70.00	73.00	76.00	79.00	82.00	
8	S1.3.3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Perangkat Daerah	Angka	91.35	91.60	91.85	92.20	92.60	93.00	93.55	
9	S1.4.1 Produksi ikan	Ton	9,512.07	9,696.52	9,893.69	10,104.23	10,328.85	10,568.27	10,823.31	
10	S1.5.1 Angka Konsumsi Ikan	Angka	25.42	27.14	27.41	27.66	27.95	28.23	28.31	
11	T2.1 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	77.87	78.23	78.54	81.46	84.85	88.38	88.50	
12	S2.1.1 Rasio Cadangan Beras Pemerintah terhadap Perhitungan	%	44.81	53.06	53.64	54.23	54.24	54.84	54.85	

	Cadangan Beras sesuai Peraturan Bapanas									
13	S2.2.1 Rasio desa rentan rawan pangan	%	38.87	38.11	36.98	34.72	32.45	31.32	29.81	
14	S2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan	Angka	96.06	96.72	97.38	98.03	98.69	99.34	100.00	
15	S2.3.2 Prevalensi of Undernourishment (PoU)	%	13.39	11.86	10.68	9.49	8.36	7.26	6.33	

4.4.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam dokumen ini merupakan penanda vital yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program dalam berbagai aspek pembangunan. Indikator ini mencakup berbagai metrik kuantitatif yang disusun untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja program dari tahun ke tahun, mulai dari baseline pada tahun 2025 hingga target akhir di tahun 2030. IKK Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo beserta targetnya sebagai berikut :

Tabel 4.4.2 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	OC1.1.1.1 Produktivitas padi	Ton/Ha	5,33	5.35	5.37	5.38	5.40	5.41	5.42	
2	OC1.1.1.2 Produktivitas ubi kayu	Ton/Ha	21,16	21.36	21.56	21.76	21.96	22.16	22.36	
3	OC1.1.1.3 Produktivitas kentang	Ton/Ha	14,4	14.50	14.60	14.70	14.80	14.90	15.00	
4	OC1.1.1.4 Produktivitas cabe	Ton/Ha	4,6	4.70	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	
5	OC1.1.1.5 Produktivitas bawang daun	Ton/Ha	11,8	11.83	11.85	11.88	11.90	11.93	11.95	
6	OC1.1.1.6 Produktivitas bawang merah	Ton/Ha	7,2	7.25	7.30	7.35	7.40	7.45	7.50	
7	OC1.1.1.7 Produktivitas salak	Ton/Ha	6,08	6.15	6.22	6.29	6.36	6.43	6.50	
8	OC1.1.1.8 Produktivitas kopi	Ton/Ha	2,4	2.47	2.53	2.60	2.67	2.74	2.80	
9	OC1.1.1.9 Produktivitas kelapa	Ton/Ha	1,1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	
10	OC1.1.1.10 Produktivitas kapulaga	Ton/Ha	5,02	5.08	5.15	5.21	5.27	5.34	5.40	
11	OC1.1.2.1 Produksi padi	Ton	120.006,52	120,297.59	120,670.60	121,043.61	121,416.62	121,646.72	121,871.57	
12	OC1.1.2.2 Produksi ubi kayu	Ton	55.977,12	56,506.22	57,035.32	57,564.42	58,093.52	58,622.62	59,151.72	
13	OC1.1.2.3 Produksi kentang	Ton	40.900,00	41,325.00	41,610.00	41,895.00	42,180.00	42,465.00	42,750.00	
	OC1.1.2.4 Produksi cabe	Ton	46.960,29	47,977.60	48,998.40	50,019.20	51,040.00	52,060.80	53,081.60	

	OC1.1.2.5 Produksi bawang daun	Ton	30.439,46	30,503.95	30,568.44	30,632.93	30,697.42	30,761.91	30,826.40	
	OC1.1.2.6 Produksi bawang merah	Ton	854,15	862.75	868.70	874.65	880.60	886.55	892.50	
	OC1.1.2.7 Produksi salak	Ton	21.269,00	22,332.52	23,449.15	24,621.61	25,852.69	27,145.32	28,502.59	
	OC1.1.2.8 Produksi kopi	Ton	816,49	856.07	898.66	944.56	994.08	1,047.58	1,105.44	
	OC1.1.2.9 Produksi kelapa	Ton	2.434.567,00	2,702,369.00	2,726,715.00	2,751,061.00	2,775,406.00	2,799,752.00	2,824,098.00	
	OC1.1.2.10 Produksi kapulaga	Ton	3.601,00	3,642.58	3,687.73	3,732.87	3,778.02	3,823.17	3,869.75	
	OC1.1.3.1 Persentase pengendalian hama penyakit yang tertangani	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	OC1.1.4 .1 Rasio kelembagaan petani yang memiliki usaha produktif	%	17,78	17.78	19.26	22.22	25.18	28.15	31.11	34.07
	OC1.1.4 .2 Jumlah kelembagaan asosiasi komoditas	Angka	N/A	N/A	1.00	3.00	5.00	7.00	8.00	10.00
	OC1.1.4 .3 Rasio Petani Muda	%	18,51	18.51	18.71	18.91	19.11	19.31	19.51	19.71
	OC1.2.1.1 Jumlah Populasi Ternak Besar	Ekor	12,589.00	13,667.00	13,918.00	14,047.00	14,178.00	14,309.00	14,367.00	
	OC1.2.1.2 Jumlah Populasi Ternak Kecil	Ekor	227,850.00	227,850.00	234,018.00	236,325.00	238,651.00	240,993.00	244,122.00	
	OC1.2.1.3 Jumlah Populasi Unggas	Ekor	17,851,328.00	18,350,430.00	18,708,946.00	18,947,324.00	19,189,509.00	19,435,516.00	19,477,026.00	
	OC1.2.1.4 Jumlah Populasi Domba Wonosobo	Ekor	15,489.00	16,543.00	17,039.00	17,550.00	18,077.00	18,619.00	19,178.00	
	OC1.2.2.1 Rasio Tempat Pemotongan Hewan	%	23.76	26.62	29.31	32.81	35.76	39.06	41.16	

	(Ruminansia dan Unggas) yang berizin									
	OC1.2.3.1 Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang tertangani	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	OC1.3.1.1 Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	OC1.3.1.2 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	OC1.3.1.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Angka	90	90.00	90.50	91.00	91.50	92.00	92.50	
	OC1.3.1.4 Persentase keterisian data statistik sektoral	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	OC1.3.1.5 Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka	65,64	68.00	70.00	73.00	75.00	76.00	76.50	
	OC1.3.1.6 Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	OC1.4.1.1 Produksi Perikanan Tangkap	Ton	581.170	598.61	616.56	635.06	654.11	673.74	693.95	
	OC1.4.2.1 Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8.290,90	8,622.54	8,967.44	8,981.23	9,340.48	9,354.85	9,729.05	
	OC1.4.3.1 Persentase wilayah perairan umum yang sudah diawasi secara reguler (1 bulan sekali)	%	45.45	54.54	63.63	72.72	81.81	90.09	100.00	
	OC1.5.1.1 Rasio UPI yang	%	N/A	31.43	42.85	57.14	71.43	85.71	100.00	

	bersertifikat									
	OC1.5.1.2 Pertumbuhan pemasaran hasil olahan perikanan yang diproduksi UPI	%	N/A	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	
	OC2.1.1.1 Persentase desa yang ada RMU	%	63.02	64.15	65.28	66.42	67.17	67.92	70.00	
	OC2.1.2.1 Rasio lumbung pangan aktif	%	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	
	OC2.2.1.1 Persentase Desa Sangat Tahan Pangan	%	23.02	23.40	23.77	24.53	25.28	26.04	26.41	
	OC2.3.1.1 Angka Konsumsi Energi	Kg/kal/hari	1,995.70	2,013.10	2,030.50	2,047.90	2,065.20	2,082.60	2,100.00	
	OC2.3.1.2 Angka Konsumsi Protein	Kkal/perkapita/hari	61.49	61.5	61.51	61.53	61.54	61.56	61.57	
	OC2.3.2.1 Rasio Keamanan Pangan	%	90.66	91.06	91.56	92.16	92.86	93.66	94.56	
	OC2.3.2.2 Jumlah Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Teregistrasi	Angka	30	40.00	52.00	64.00	76.00	88.00	100.00	

BAB V. PENUTUP

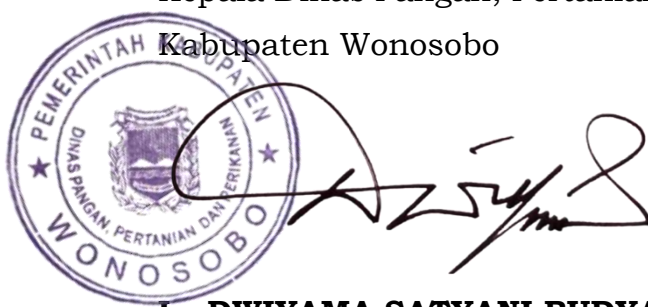
Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang komprehensif dan terarah untuk mendukung pembangunan sektor pangan, Pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran serta strategi pelaksanaan yang jelas, yang bila diimplementasikan secara efektif diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Sinergi antar pemangku kepentingan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal merupakan kunci keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis, pengendalian dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana melalui pemantauan capaian kinerja, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan serta evaluasi penggunaan sumber daya agar pelaksanaan berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

Sementara itu, manajemen risiko diterapkan untuk mengantisipasi potensi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian sasaran dengan cara mengidentifikasi risiko, menilai dampaknya, menetapkan langkah mitigasi dan memantau perkembangannya secara berkala agar gangguan dapat dicegah atau dikendalikan sejak dini.

Dengan kesungguhan, komitmen serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi pijakan yang kokoh untuk mewujudkan pembangunan sektor pangan, Pertanian dan perikanan yang menjadi pilar utama menuju Kabupaten Wonosobo yang sejahtera, adil dan makmur.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Wonosobo



Ir. DWIYAMA SATYANI BUDYAYU, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670102 199403 1 010